Cerita Tentang Rumah Kedua Itu:

Menabur Relasi Antar Teman Seatap I Mahalnya Arti Sebuah Komunikasi I Memimpikan Sebuah Keteraturan I Bersama Merengguk Keharmonisan I Menekuni Bisnis Dari Bilik Kos I Kurang Bebas Tapi Tentram Menggadai Privasi Demi Organisasi

BALKON
edisi khusus 2004
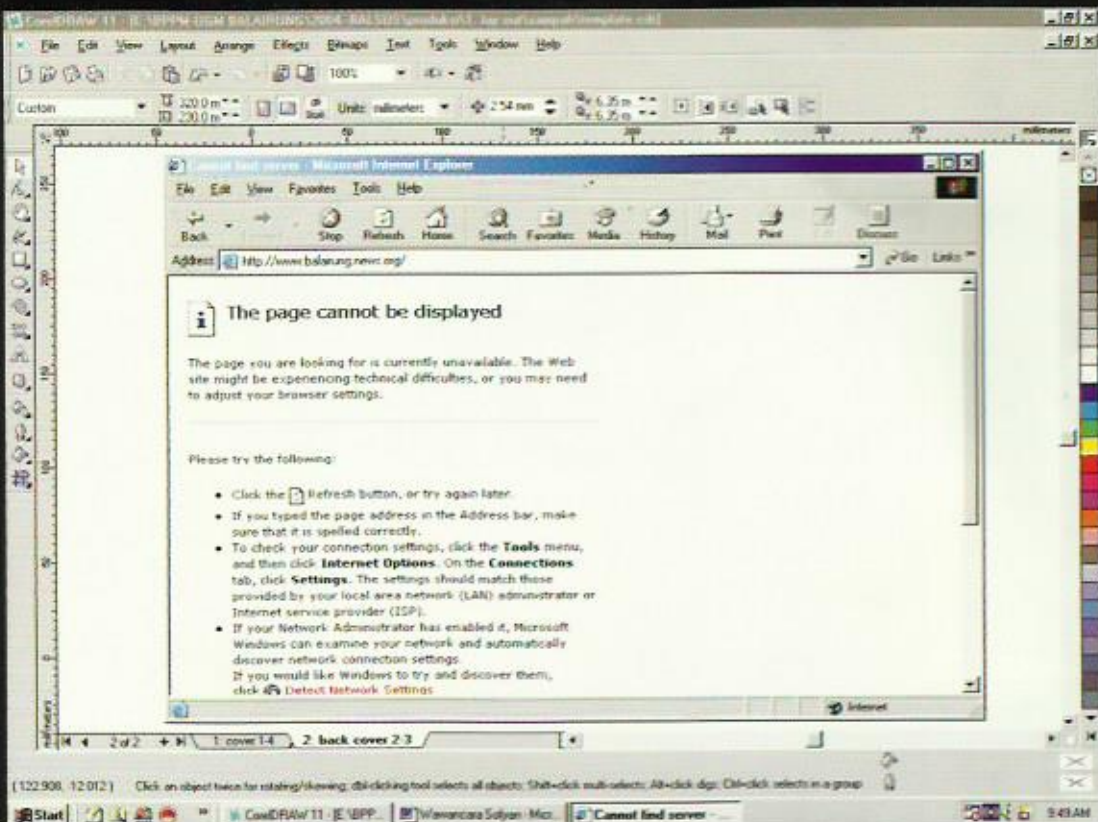
sorry for this inconvenience page
site is not available this time

But we make it available at 20th September 2004
http://www.balairungnews.org

Cerita Tentang Rumah Kedua Itu ...

Rumah adalah titik awal sekaligus titik akhir. Ya, tidak ada yang akan membantahnya. Dari sanalah, segala kegiatan sehari-hari, dari yang paling sepele sampai yang paling serius, diawali. Dan di sana pula, setumpuk kegiatan diakhiri.

Rumah, juga menawarkan pesonanya yang lain. Yang membuat kita selalu rindu untuk buru-buru 'pulang' ke sana. Pulang pada kehangatan, ketentraman, dan juga kedamaian.

Tapi itu dulu. Karena sekarang, dengan status perantauan, keinginan untuk pulang harus ditangguhkan sementara waktu. Hingga saat itu tiba, kita mesti singgah di tempat yang lain. Pada sebuah ruang sempit berukuran 3x3 meter yang akan menjadi titik awal dan titik akhir kegiatan sehari-hari selama berada di rantau

Ruang sempit itu entah yang disebut pondokan, kos, kontrakan, ataupun asramajuga menyediakan fungsi rumah yang lain. Di ruang itulah, kita lari dan bersembunyi dari segala kepenatan dan hiruk pikuk dunia. Ruang itu juga menyediakan sebuah lingkaran baru bagi persahabatan. Sebuah percobaan untuk berinteraksi. Serta sebuah makna baru bagi kata keluarga. Maka, rasanya tak berlebihan bila kemudian kita menyebutnya sebagai rumah kedua.

Tentu saja, ada banyak hal yang berbeda. Bila rumah seolah memiliki aura kehangatannya sendiri, maka di tempat singgah yang baru, kehangatan itu harus direkayasa. Karena di sana, segala sesuatu serba baru. Mulai dari kebiasaan, aturan, teman, perabotan, juga bau tembok yang habis dicat itu. Dalam ruang sempit berjejal-jejal itulah, kedewasaan seseorang di akhir usia belasan, mendapat ujian.

Ada banyak cerita di sana. Tentang bagaimana Ucok memulai pengembaraannya di pulau seberang. Cerita si da Costa yang di pelonco sebelum resmi menjadi warga sebuah asrama. Lalu terdengar bisik-bisik curiga ketika Diana, seorang mahasiswi manis yang modis, kerap pulang ke kosan lewat tengah malam. Juga sebuah artikel kecil di surat kabar lokal yang memberitakan tertangkapnya Tomy, mahasiswa asal Jakarta, yang sedang teler di kamar kosnya. Kisah-kisah itu membuktikan bahwa ruang-ruang sempit tersebut memang punya arti besar.

Berawal dari sana, maka Balairung Koran (BALKON) mencoba mengangkat fenomena tersebut dalam edisi khusus kali ini. Meski, tentunya, sajian kali ini tidak menampung seluruh soal yang ada di sana. Lagi pula, setiap tahun ajaran baru, kami akan kedatangan kawan-kawan baru yang, sudah pasti, akan menjadi warga dari rumah kedua itu. Selamat membaca.

DITERBITKAN OLEH BPPM UGM BALAIRUNG

Penanggungjawab: Lukman Solihin **Editor**: Idha, Gilang, Asep, Dia, Karin, Heru **Redaksi**: Angga, Ryan, Izzah, Very, Dinar, Adi, Puji, Imung, Nurdin, Teristy, Arif, Andi **Riset**: Adam, Qustan, Rusman, Reza, Nadya, Agus, Opix **Perusahaan**: Vera, Alfi, Dian, Agung, Aris **Produksi**: *Lay out*: Bram, Sukma, Jay, *Ilustrasi*: Satya, Zulfa, *Foto*: abib

ALAMAT REDAKSI DAN SIRKULASI: BULAKSUMUR B-21 YOGYAKARTA 55281, FAX:(0274)566171, E-MAIL: BALKON.UGM@EUDORAMAIL.COM, REKENING BRI YOGYAKARTA CIK DITIRO NO.0029-01-039981-50-6 A.N TITI HIDAYATUN +++ GRATIS DI: UPT I, UPT II, PERPUSTAKAAN PASCASARJANA, MASJID KAMPUS, BONBIN SASTRA, GELANGGANG MAHASISWA, WARTEL KOPMA, PARKIR TP, KAFETARIA KOPMA, FASNET TEKNIK, KPTU TEKNIK, WARNET EKONOMI, PLAZA FISIPOL, KANTIN BIOLOGI, KANTIN PETERNAKAN, KANTIN FILSAFAT, FAKULTAS-FAKULTAS LAIN, DAN BULAKSUMUR B-21

Redaksi menerima tanggapan, pesan, kritik, maupun saran pembaca sekalian yang berkaitan dengan lingkungan UGM melalui alamat E-Mail: balkon_ugm@eudoramail.com atau SMS ke 0818 0820 3257 atau juga dapat langsung disampaikan kepada awak balairung di Bulaksumur B-21.

SANDAL HARAP DILEPAS

Menabur Relasi Antar Teman Seatap

abib/bal

Interaksi sosial di Yogyakarta tak bisa dilepaskan dari dinamika pelajar, mahasiswa, dan tempat kos. Perkembangan zaman tak pelak membawa angin perubahan dalam pola interaksi di sana.

Di tengah kontroversi mahalnya biaya pendidikan, setiap mula tahun akademik, Yogya masih kebanjiran perantau yang datang mencari ilmu. Iklim sosial yang bersahabat dan biaya hidup yang relatif rendah menjadi magnet tersendiri bagi ribuan pelajar dan mahasiswa dari luar Yogya. Sebagai anak rantau, hidup mandiri mutlak dijalani, termasuk soal tempat tinggal. Bagi mereka yang tak memiliki sanak saudara untuk ditumpangi, tinggal di tempat kos menjadi alternatif. Beragam pilihan tempat kos ditawarkan, mulai dari tempat kos khusus perempuan atau laki-laki hingga tempat kos campur yang tidak mempersoalkan jender. Ada juga kos dengan peraturan seketat asrama sampai kos yang tak membatasi ruang gerak penghuninya. Karakterisistik tempat kos menjadi bagian tak terpisahkan dari keutuhan relasi antarpenghuni.

Di kawasan Sendowo, berjejal bangunan penuh kamar yang kian menghimpit gang-gang sempit. Selain merupakan pemukiman penduduk, deretan bangunan itu kebanyakan berfungsi sebagai tempat kos. Lusi, mahasiswi Fak. Kedokteran UGM '02 adalah salah satu penghuninya. Ia tinggal di sebuah tempat kos putri yang memiliki 27 kamar dan saat ini seluruhnya penuh terisi. Dapat dibayangkan betapa ramai suasana tempat kos itu. Bagi Lusi yang memanfaatkan tempat kos tak hanya sebatas tempat tidur belaka, kondisi ini cukup meresahkan. Pasalnya, aktivitas belajar dan beristirahatnya kerap terganggu oleh riuh tawa dan celoteh teman-teman kosnya yang sedang asyik menonton televisi di ruang sebelah. "Makanya, aku ingin pindah. Di sini terlalu ramai, belajar susah!" ujar Lusi.

Belum lagi, konflik lokal yang sering terjadi kian membuat Lusi merasa tak nyaman. Lusi menjelaskan, biasanya perselisihan dipicu oleh *gap* yang tercipta antar sesama penghuni kos. Karena merasa lebih "senior", penghuni yang lebih dulu masuk berusaha untuk mendominasi penghuni lain. Dengan suara lirih, Lusi bercerita tentang anak-anak "tua" yang cenderung suka mengatur dan memerintah, juga menguasai fasilitas bersama seperti televisi.

Lain lagi cerita Wani. Mahasiswa Sastra Jerman UNY '01 ini bertutur tentang kos khusus cowok yang dihuninya. Di sana, ujar Wani, tak ada benturan kepentingan antarpenghuni. Ketika ditelisik lebih jauh, rupanya hal ini disebabkan lantaran jarang terjadi interaksi sesama penghuni kos. Meski bernaung di bawah satu atap, namun setiap anak kos datang dan pergi dengan membawa urusan masing-masing. Akibatnya, hubungan yang terjalin antar sesama
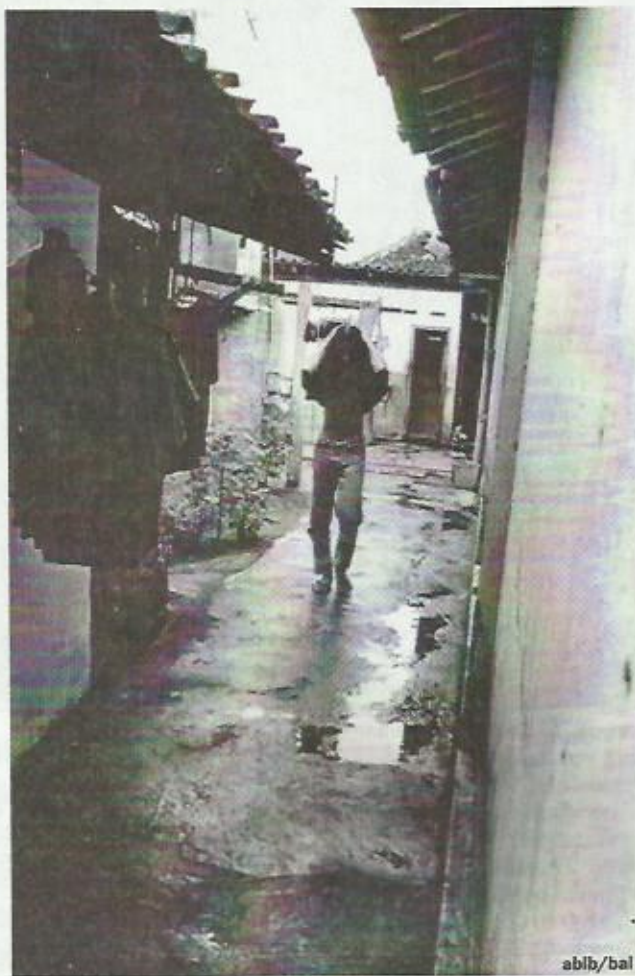
abib/bal

penghuni kos terasa kurang intim. Tegur sapa dilakukan sekadar untuk berbasa-basi. Kalaupun ada, interaksi intens hanya terjadi pada ranah personal, bukan komunal. Bahkan Wani mengaku enggan membentuk komunitas khusus intra kos. "Teman-teman kosku *nggak* asyik buat ngobrol, apalagi buat diajak jalan," keluh Wani. Mungkin karena alasan itulah ia menganggap kos hanya sebagai tempat singgah untuk mandi dan tidur. Sementara sebagian besar waktu yang ia miliki dihabiskan untuk beraktivitas di kampus.

Kisah monotonnya dinamika kos Wani tak kita jumpai di tempat kos Vidi. Mahasiswi MIPA UGM '02 ini menghuni kos campur di bilangan Sendowo. Banyak cerita menarik yang ia alami di sana. Misalnya, Vidi mengaku sering melakukan aktivitas bersama dengan teman kos cowok. Mulai dari menonton televisi sampai mandi. "Aku sering *ngajak* teman kos laki-laki untuk mandi *bareng*. *Bareng* waktunya maksudku, bukan ruangannya. Jadi di dalam sana, ya kita mandi sambil *ngobrol* he..he..he..," celoteh gadis supel ini sembari menunjuk ke arah dua toilet yang letaknya bersebelahan. Selain kamar mandi, jemuran yang jamaknya dianggap sebagai area privasi ternyata malah menjadi ajang "pameran". Semboyan menggelitik yang kerap dilontarkan adalah " Parade *Triumph* sampai *GT Man* dalam satu kawat."

Meski banyak cerita lucu terjadi, pembauran dua jenis kelamin dalam satu zona pribadi sebenarnya bukan tanpa masalah. *Cinlok* (cinta lokasi-*Red.*), misalnya, sudah menjadi peristiwa yang lazim terjadi dan tak jarang menimbulkan persoalan pelik. Konon, di tempat kos Vidi, pernah ada sesama penghuni yang berpacaran dan tidur dalam satu kamar. Ketika sang induk semang mengetahui hal itu, salah satu dari mereka diusir dan diharuskan pindah kos.

Meski masih menggunakan modus serupa, kini kasusnya agak berbeda. Percintaan tak terjalin antar penghuni kos, melainkan dengan pacar yang berbeda tempat kos. Membawa pacar menginap dalam kamar adalah hal lumrah. Dan fenomena ini menjadi rahasia yang disembunyikan rapat-rapat oleh sesama penghuni kos. Meski induk semang sudah memberlakukan jam kontrol, namun akal anak kos tak kalah cerdik. Mereka telah memiliki strategi jitu untuk berkelit dari pemeriksaan induk semang. "Waktu kontrol sekitar jam delapan sampai jam sembilan malam, tapi anak-anak memasukkan pacarnya jam sebelas malam. *Karuan aja* tidak

UNIVERSITAS GADJAH MADA

Pendidikan murah juga gak... Wah... Ngegame aja yuk

Daripada kuliah Antek komunis Mari Yeah... Ayo kawan

Mendingan main Bla bla bla...

Hantam kiri Lawan Ra mutu

Rektorat Wao... Wuuu...

Males ah Aku gak bisa sekolah

Besok ujiannya apa? Nyenyewwww... Hancurkan globalisasi

Gak perlu "2004" kat untuk jadi mahasiswa UGM

YANG PENTING DEKA!

Mahalnya Arti Sebuah Komunikasi

Hubungan intim antara anak kos dengan induk semang sangat tergantung pada komunikasi yang terjalin. Intensitas berkomunikasi memegang peran yang penting.

abib/bal

Ada banyak hal yang menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih kos. Mulai dari harga, fasilitas, hingga kenyamanan. Peraturan yang berlaku di sebuah kos kosan juga turut mempengaruhi pilihan seseorang. Sebuah kos putri di daerah Jetis, tepatnya di belakang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta, menerapkan aturan yang cukup longgar bagi penghuninya. Meski masih satu areal dengan induk semangnya, tamu cowok sah-sah saja masuk kamar. Kos ini juga tidak memberlakukan jam malam. Setiap anak kos dibekali kunci pagar sehingga mereka bebas pulang jam berapapun. "Aku *emang* sengaja *nyari* kos yang *dibolehin* pulang jam berapa pun, soalnya kerjaku baru selesai lebih dari jam 10 malam," ujar Tia, Mahasiswi Fak.Farmasi UGM'00, salah satu penghuni kos ini. Kondisi ini terbangun oleh sikap induk semang yang memilih hubungan berdasar kepercayaan pada anak kosnya. "Saya percaya sama mereka (anak kos-*Red.*). Mereka kan sudah besar, jadi sudah tahu mana yang benar dan yang tidak," jelas Bu Marjo, pemilik kos 19 kamar ini kepada BALKON.
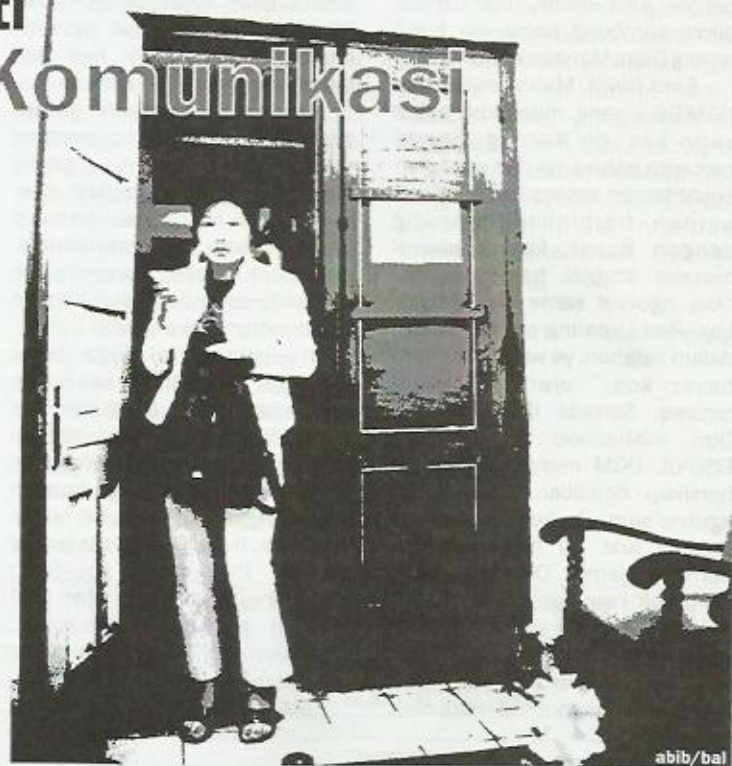
Hubungan anak kos dengan induk semang memang bermula dari transaksi bisnis. Maka ketika komunikasi jarang terjadi, anak kos dan induk semang hanya akan menjadi partner bisnis semata. Interaksi, kemudian, hanya dimaknai sebagai hubungan jual beli antara penyewa kamar dengan pemiliknya. Sebenarnya relasi yang demikian sah-sah saja, karena memang tidak ada keharusan untuk berakrab-akrab ria antara kedua belah pihak. Namun, sebagai bagian dari kenyamanan sebuah kos, hubungan baik antara keduanya tetap dibutuhkan.

Akan tetapi ukuran dan makna kenyamanan berbeda bagi tiap orang. Ukuran inipun berubah dari tahun ke tahun. Hal inilah yang membuat pola interaksi mengalami perubahan. Pada dekade tahun 70 hingga 80an akhir, interaksi antara induk semang dengan anak kos terjalin begitu baik. Rasa kekeluargaan turut mewarnai interaksi itu. "Zaman kuliah dulu, kami sangat dekat dengan ibu kos. Bila ada masalah, kami tidak segan *curhat* ke ibu. Ibu itu orangnya sangat pengertian. Beliau sudah kami anggap sebagai ibu sendiri," tutur Sri Sugihati, alumni Fakultas Sastra UGM'78, dengan antusias.

Berbeda dengan kondisi sekarang, hubungan antara anak kos dengan induk adalah hubungan bisnis semata. Jarang terjadi percakapan di antara mereka. Kalaupun ada, percakapan itu hanya bagian dari basa-basi semata. "Untuk *pantes-pantes* saja *mbak, biar nggak dikira* sombong sama ibu kos," terang Dian, Mahasiswi UGM'00.

Ewot Omra, Mahasiswa Fisika UGM'96 , yang menghuni salah satu kos di Karang Bendo bercerita bahwa dia dan sebagian besar teman kosnya hampir tidak pernah berbincang-bincang dengan Bapak kos. Padahal mereka tinggal bersebelahan. "Aku *ngobrol* sama bos (bapak kos–*Red.*) paling-paling sekali dalam setahun, ya waktu aku mau bayar kos," ujarnya sambil tertawa. Senada dengan Ewot, Dini, mahasiswi tingkat lima FISIPOL UGM mengaku memilih bersikap demikian. "Aku cuma *ngobrol* sama ibu kos waktu bayar kos, di luar itu hampir *nggak* pernah," ujarnya. Dini melakukan itu untuk menjaga jarak dengan ibu kos. Menurut pengakuannya, berhubungan dekat dengan ibu kos bisa beresiko. Dini tidak mau dianggap sebagai mata-mata oleh yang lain.

Ternyata, induk semang juga memiliki pendapat yang sama dengan anak kosnya. Banyak induk semang yang mengakui bahwa komunikasi dengan anak kos hanya terjadi saat menagih uang kos. "Ya jujur *aja* ya mbak, biasanya saya *ketemu* mereka hanya saat mau ambil uang kos," papar Ningsih (bukan nama sebenarnya), pemilik salah satu kos di Jalan Kaliurang km 5. Ia mengaku tak bisa mengunjungi anak kosnya setiap hari, pasalnya Ningsih tidak tinggal di Jogja, tapi di Solo. Senada dengan Ningsih, Bu Marjo pemilik kos putri di daerah Jetis, menjelaskan bahwa komunikasinya dengan anak kos sangat jarang, meski rumahnya masih satu areal dengan kos-kosan. "Biasanya saya *ngobrol-ngobrol* sama anak kos pas mereka bayar kos," akunya.

Jalinan komunikasi antara anak kos dengan induk semang yang kian merenggang merupakan indikator dari kian mengentalnya sikap individualisme di antara mereka. Baik induk semang maupun anak kos lebih asyik bergumul dengan kehidupan mereka sendiri.

Kenyataan ini juga turut diperkuat oleh kondisi kos-kosan yang ada. Format bangunan kos yang tidak lagi satu atap dengan induk semang semakin memperlebar jarak. "Hubungan kami dengan bapak kos *sih* biasa-biasa *aja, lagian* kami juga jarang ketemu. Dia (bapak kos–*Red.*) tidak tinggal di sini," ujar Dita (bukan nama sebenarnya), mahasiswi FISIPOL'02, penghuni kos di daerah Klebengan.

Apa yang dialami Dita cukup berbeda dengan kebanyakan kos di era 80-an. Bangunan kos yang menyatu dengan induk semang mempermudah terjadinya komunikasi secara intens. Akibatnya, hubungan yang terjalin di antara keduanya menjadi lebih akrab. "Tempat kos saya dulu jadi satu sama ibu kosnya, jadi mau *nggak* mau kita setiap hari ketemu. Lama-lama jadi akrab *deh,*" ujar Sri Sugihati.

Sebagai pemilik kos, Royidin sudah sekuat tenaga menjaga anak kosnya dengan memberlakukan peraturan yang cukup ketat. Namun, Royidin masih saja *kecolongan.*

sbib/bal
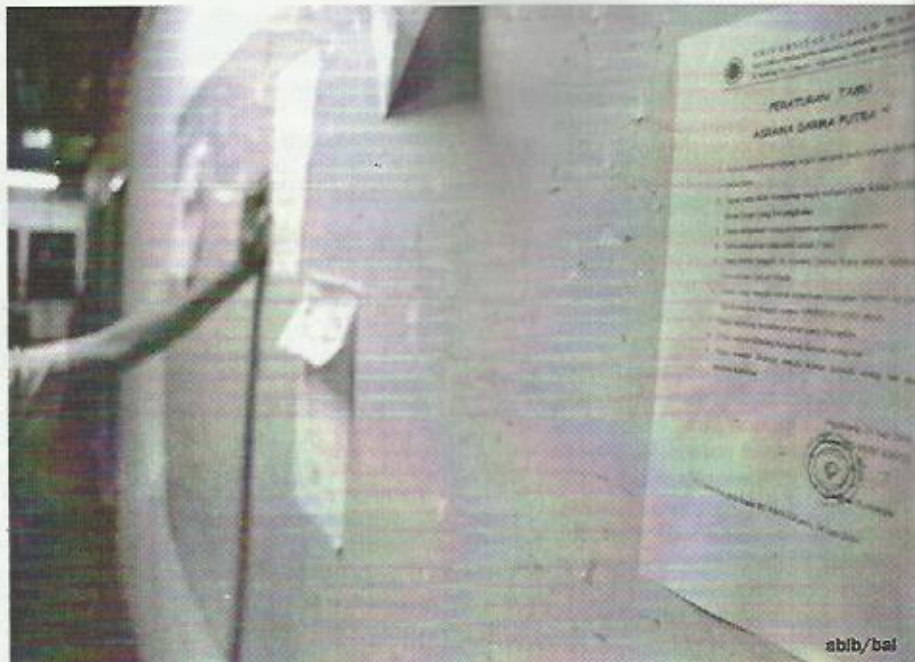
Namun demikian, sebersit optimisme akan keharmonisan hubungan antara induk semang dengan anak kos masih tetap tersisa. Suasana kekeluargaan ternyata masih hidup di beberapa kos. Salah satunya kos putra di daerah Blunyahrejo. Aura keakraban antara anak kos dengan induk semangnya tampak mewarnai keseharian kos dengan 30 kamar itu. "Ibu kos orangnya ramah dan baik banget sama kita. Hampir tiap pagi beliau membangunkan kami untuk sholat subuh," kata Reza, mahasiswa Fak.Hukum'02 UGM ini dengan bangga. Bahkan, saat Lebaran tiba, induk semang memberi semacam THR (Tunjangan Hari Raya--*Red.*) sebagai uang saku pada anak kosnya.

Individualitas antara anak kos dan induk semang memang tampak semakin kental mewarnai kehidupan anak kos sekarang. Kekurangpedulian induk semang pada anak kosnya berpotensi memunculkan situasi yang *out of control*. Maraknya pergaulan bebas macam *free sex* dan penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa, bisa jadi, adalah akibat dari situasi ini.

Seperti yang menimpa salah satu kos di daerah Karang Malang. Sebagai pemilik kos, Royidin sudah sekuat tenaga menjaga anak kosnya dengan memberlakukan peraturan yang cukup ketat. Namun, Royidin masih saja *kecolongan*. "Dulu ada anak kos sini yang hampir tiap hari pulang malam dengan membawa cowok yang berbeda. Suatu malam dia pamit *nginap* di luar, *ngakunya sih* tidur di tempat Om-nya. Setelah saya cek, orang tuanya sama sekali tidak kenal sama Om-nya itu," papar guru salah satu SMP di Jogja ini prihatin. Kekhawatiran Royidin ini akhirnya berlanjut pada pengusiran anak kos tersebut. Belakangan, dia mendengar kabar bahwa mantan anak kosnya itu hamil di luar nikah.

Hal yang sama juga dialami oleh Ndaru, (bukan nama sebenarnya) mahasiswi tingkat 3 UGM. Pada suatu malam, secara tak sengaja, dia memergoki teman satu kosnya membawa pacarnya bermalam di kamarnya. "*Mbak* kosku *sih* langsung klarifikasi *kalo* pacarnya cuma mau *nebeng* nonton bola. Aku *nggak tau mesti* komentar apa," ujarnya sambil tersipu malu. Ilustrasi yang dipaparkan Iip Wijayanto dalam bukunya *Sex In The Kost* seolah mewakili apa yang dialami Ndaru. Demikianlah, perubahan pola interaksi memang menawarkan berbagai konsekuensi.[]

Arief | Dinar

MEMIMPIKAN SEBUAH KETERATURAN
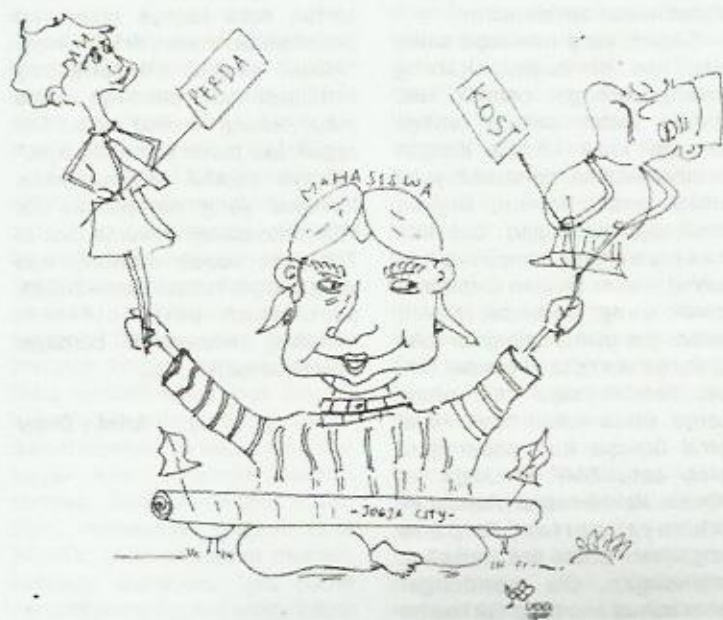
"Menimbang : bahwa citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan dan Kota Budaya perlu dilestarikan dan terus dikembangkan."

Itulah salah satu pointer yang tertera dalam konsiderans (pertimbangan yang menjadi dasar penetepan suatu keputusan--Red.), Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2003 tentang Penyelengaraan Pondokan. Perda tersebut ditandatanggani oleh H.Herry Zudianto, Wali Kota Yogyakarta, 15 Desember 2003 silam.

Predikat Yogyakarta sebagai kota Pendidikan dan kota Budaya mulai banyak dipertanyakan. Maraknya berita miring seputar seks bebas, aborsi, narkoba, dan tindak kriminal lainnya semakin menguatkan pendapat itu.

Perda merupakan salah satu produk hukum, yang salah satunya berfungsi sebagai alat perekayasa masyarakattool of social enggingering.Yakni, untuk mengkondisikan dan mengarahkan masyarakat sehingga 'luka' Yogyakarta dapat dipulihkan.Anak kost yang diangap sebagai asal muasal masalah perlu segera ditata. " Perda ini, paling tidak dapat memfilter kondisi pondokan.Jika dipondokan dah baik, tentu, itu (seks bebas, narkoba–Red.) dapat dihindari," ujar M.Sarjono,SH., Kepala Bagian Hukum, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. "Dalam Perda ini ditekankan juga tanggungjawab pemilik kost terhadap anak kostnya. Bukan sekedar hubungan bisnis *thok*," lanjutnya. Perda ini antara lain mengatur perizinan, hak dan kewajiban pemilik maupun anak kos, peran serta masyarakat, dan sanksi pidana..

Keluarnya Perda ini boleh dikatakan terlambat. Pasalnya, aturan yang ada sebelumnya, yakni Surat Keputusan (SK) Walikota No 145/KD/1985 tentang Penertiban Penyelengaraan Usaha Pondokan, tidak pernah diperbaharui. Perkembagan masyarakat yang cepat tanpa diimbangi dengan aturan yang memadai, membuat masalah semakin bertumpuk. Alhasil, seks bebas, narkoba, dan tindak kriminal lainnya semakin menggerogoti Kota Budaya ini. Bila dicermati, Perda tersebut telah mementahkan andragogi "mencegah lebih baik daripada mengobati". Namun apa boleh dikata, lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali.

Pelaksanaan Perda pun masih berjalan di tempat. Sosialisasi yang lamban dan belum adanya aturan pelaksana berupa SK Wali Kota membuat Perda ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Tak heran jika beberapa pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda dibiarkan saja. Kos-kosan gabungan pria dan wanita, misalnya. Kewajiban membuat Kartu Penduduk Musiman (KIPEM) juga masih diabaikan oleh mahasiswa. Perda tersebutpaling tidak sampai saat inimenjadi aturan normatif semata. Terkait soal ini Sarjono

berkomentar. "Kita masih tahap sosilisasi, belum pada tahap penindakan. Surat Keputusan (SK) baru masih disusun. Tapi secepatnya kita akan mengarah kesana (Pelaksanaan Perda--Red.) Kilahnya.

Lambannya sosialisasi Perda dibenarkan oleh Sentot W. "Perda belum tersosialisasikan sampai ke tingkat bawah. Sekarang masih dalam proses pendataan," ujar pegawai kelurahan yang juga ketua RT 39/VIII Kelurahan Cokrokusuman ini prihatin. Hal senada juga diungkapkan oleh Dimas, mahasiswa asal Kalimantan, ketika ditanya tentang kewajiban KIPEM. "Sejauh ini saya belum mendengar kabar itu (kewajiban KIPEM--Red.)," aku mahasiswa yang tinggal di Cokrokusuman itu pada BALKON. Sedikit berbeda, Eka Anthiarni, mahasiswi Akuntansi'02 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), mengaku pernah mendengar secara sekilas perihal KIPEM tersebut. Namun, ia belum mengetahui isinya secara keseluruhan. "Mungkin sosialisasinya kurang sehingga masih banyak yang belum tahu," ujar mahasiswi berkerudung ini datar.

Lain Pemkot Yogyakarta, lain pula Pemerintah Daerah (Pemda) Sleman. Meskipun memiliki jumlah pondokan paling banyak, Pemda Sleman masih mengandalkan SK Bupati dalam pengaturan pondokan. Sampai saat ini Pemda Sleman telah menelorkan empat SK yang mengatur pondokan. (lihat tabel). Terakhir Pemda Sleman mengeluarkan SK Bupati No 20 /Kep.KDH/A/2003 tentang Standar Fasilitas Pondokan.

Secara hukum, hal-hal yang bersifat pengaturan seharusnya diatur dalam Perda. "Secara yuridis hal-hal yang bersifat pengaturan diatur dengan Perda. SK itu cenderung sebagai aturan pelaksana," tutur DR. Sukismo, SH, Dosen Fakultas Hukum UGM.

Perlunya kajian yang mendalam menyangkut hal-hal yang akan diatur menjadi alasan Pemda Sleman tetap berkutat dengan SK. "Kita harus mengkaji seluruh aspek. Anak kos, pemilik kos, kos itu sendiri dan di luar itu," papar Herry D. Kuryanto, SH., Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Pemda Sleman beralasan. "Rencananya, tahun depan, Perda sudah ditetapkan," tambahnya.

Masyarakat menangapi berbagai peraturan tersebut dengan dingin. Sebagian besar masyarakatterutama pemilik pondokanmenganggap bahwa peraturan tersebut hanya dijadikan sebagai alat untuk menarik retribusi. Endro, salah satu pemilik kos-kosan di Klebengan, menganggap bahwa peraturan yang dikeluarkan Pemda hanya membebani masyarakat. Misalnya dalam bentuk retribusi, atau punggutan lainnya.

Sedikit berbeda. Salamun, tidak begitu mempersoalkan peraturan selama tidak merugikan masyarakatterutama dalam soal retribusi atau pajak. "Tak jadi masalah sih, asalkan adil, dan jangan ujung-ujungnya penarikan pajak," ujar pemilik kos-kosan di Karang Malang, yang juga kepala dukuh Karang Malang dan Kuningan.

Tak jauh beda dari saudaranya, Perda Pemkot, SK Pemda Sleman juga belum berfungsi secara optimal. Selain banyak pondokan yang dibangun sebelum SK ini keluar, tidak adanya sanksi yang tegas, serta kurangnya kesadaran masyarakat membuat SK terasa hampa. Masih banyak pondokan yang belum menyesuaikan dengan standar fasilitas yang ditetapkan.

Mengomentari ini, Ir. Setiantono, M.Sc, Kepala Dinas Pemukiman Prasarana Wilayah dan Perhubungan, selaku tim teknis pelaksana SK mengiyakan. "Selain kurangnya kesadaran masyarakat, tidak adanya sanksi yang tegas membuat SK ini kurang optimal dalam pelaksanaannya," ujarnya.

Sebenarnya, jauh sebelum pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan tentang pondokan, masyarakat, sebagai pihak yang langsung berhubungan dengan anak kos, telah mempunyai aturan sendiri. Baik tertulis maupun tidak. Aturan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat secara langsung.

Misalnya, pemberlakuan jam malam, jam kunjung tamu, dan larangan pencampuran laki-laki dan perempuan dalam satu pondokan. Namun

Pemerintah Daerah Sleman

No	Bentuk Peraturan	Isi
1.	SK Bupati No 92/Kep.KDH/1987 tentang Penertiban Penyelengaraan Usaha pondokan/Penyewan Kamar	Mengatur tentang pemondokan dan penyewaan kamar secara umum, mulai dari syarat pendirian pemondokan, syarat pemondok, klasifikasinya hingga hingga besar sewa yang harus dibayar oleh pemondok. Selain itu, SK ini juga mengatur tentang kewajiban pemilik pemondokan, terutama terkait dengan besarnya pajak, serta bagaiman operasionalnya.
2.	SK Bupati No 65/Kep.KDH/1989 tentang Punggutan Usaha Pondokan/Penyewaan kamar	Memperbaharui SK Bupati No 92/Kep.KDH/1987, Bab IV bagian keenam pasal 7, terutama yang menyangkut syarat mendirikan pondokan, syarat pemondok, klasifikasi pondokan, dan besarnya sewa pondokan.
3.	SK Bupati No 269/Kep.KDH/1999 tentang Pengenaan PPI dan sistem Pemungutannya.	Memperbaharui SK Bupati No 65/Kep.KDH/1989 tentang Pengenaan PPI dan sistem pemungutannya.
4.	SK Bupati No 20/Kep.KDH/A/2003 tentang Standar Fasilitas Poondokan.	Fasilitas pondokan terdiri atas fasilitas ruang (kamar tidur,ruang ibadah, ruang tamu, ruang serbaguna, dapur, ruang mandi, kakus, ruang cuci, ruang setrika, ruang parkir, gudang, dan kamar pengelola) dan fasilitas pelayanan dan lingkungan (fasilitis listrik, telepon, air bersih, taman, parkir tamu, resepan air hujan, drainase, tangkiseptik, dan pemadam kebakaran)

Pemerintah Kota Yogyakarta

No	Bentuk Peraturan	Isi
1.	SK Walikota No.145/KHD/1985 tentang Penertiban dan Penyelenggaraan Usaha Pemondokan	Kewajiban penyelenggara usaha pemondokan dan pemondok, pengawasan, dan larangan pemondokan
2.	Perda No.4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan	Ruang lingkup, asas dan tujuan penyelengaraan pondokan, hak dan kewajiban penyelengara dan pemondok, izin penyelenggaraan pondokan, larangan, peran serta masyarakat, pencabutan izin, dan sanksi

Peraturan *Non-formal* dari Masyarakat

No	Bentuk Peraturan	Isi
1.	Jam Malam	Jam belajar masyarakat berlaku dari jam 18.00-21.00
2.	Jam Belajar	Jam belajar masyarakat berlaku dari jam 18.00-21.00
3.	Jam Kunjung	Bertamu hanya diperbolehkan sampai jam 21.00
4.	Penerimaan Tamu	Dilarang membawa tamu yang berlawan
5.	Hubungan Pemondok dengan Masyarakat	Setiap pemondok dilibatkan dalam setiap kegiatan kampung

teguran, peringatan, atau pandangan buruk di mata masyarakat.

Terkait percampuran antara laki-laki dan perempuan dalam satu pondokan, Salamun kembali mengatakan, tidak menjadi masalah apabila ada induk semang yang mengawasi secara langsung. Artinya, induk semang juga tinggal di pondokan itu. "Kalau satu rumah kan pemilik dapat memperhatikan tingkah laku mereka. Mudah dikontrol," ujar pemilik kos-kosan 19 kamar ini. Lain halnya dengan Endro, pemilik kos campur (kos yang menerima penghuni putra dan putri dalam satu rumah–Red.) di Klebengan. Menurutnya, tidak harus ada induk semang. "Biarlah masyarakat yang mengawasi. Saya pikir mereka (anak kos-kosan–Red.) sudah dewasa," tuturnya simpel.

Edo, salah seorang penghuni kos campur mengatakan bahwa pengawasan dari induk semang tidaklah terlalu diperlukan. Yang lebih penting, baginya, adalah pengendalian diri. Ketika ditanya tentang interaksi antara penghuni putra dengan penghuni putri di kosnya, mahasiswa asal Manado ini mengaku tidak pernah berinteraksi dengan penghuni putri. "Di sini laki-laki dan perempuan terpisah, meski masih dalam satu bangunan. Laki-laki di lantai bawah, wanita di lantai atas. Selain itu ada pagar dan tembok besar yang menjadi pemisah," ujarnya sambil menunjuk tembok yang dimaksud. Tak heran bila banyak penghuni kos yang tak mengenal satu sama lain.

Senada dengan Edo, Dini, yang sudah lima tahun tinggal di kos campur, mengaku tidak mempersoalkan hal tersebut. Menurutnya, yang penting adalah rasa saling menghargai antar para penghuninya. "Kita kan sudah dewasa. Jadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk," tegasnya.

***

Kehidupan anak kos yang cenderung mengarah pada hal negatif akhir-akhir ini, tidak hanya membuat gerah pemerintah semata. Ibu-ibu PKK pun merasa terpanggil untuk mengembalikan citra Jogja. Dibawah koordinasi ketua PKK kota Jogja, Hj. Dyah Suminar, SE, diluncurkan program, "Sapa Anak Kos" sejak tahun 2003 silam. Ibu-ibu PKK secara langsung mendatangi tempat pondokan dan berdialog dengan anak-anak kos. "Dengan mendatangi mereka secara langsung, dapat diketahui apa sih yang mereka harapkan dan inginkan ketika berada di sini," ungkap Istri Walikota Jogja ini datar.

Selain itu, menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kota Yogya sebagai kota pendidikan juga sebagai salah satu pemicu lahirnya progam "Sapa Anak Kos". Banyak orang tua merasa was-was ketika menyekolahkan anak-anak mereka ke kota ini. Hal ini dapat dilihat dari semakin menurunnya jumlah mahasiswa yang menimba ilmu di kota Yogyakarta. "Siapa yang tidak kecewa ketika melihat anaknya gagal menempuh studi, padahal sudah jauh-jauh datang ke Yogyakarta," tutur ibu berjilbab ini prihatin.

Sudah banyak peraturan-peraturan dibuat, dan tidak sedikit pula program yang telah diluncurkan. Namunpaling tidak sampai saat inipermasalahan anak kos belum juga kunjung usai. Bahkan, cenderung meningkat. Terkait dengan ini, Dr.J.Nasikun, Sosiolog Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan bahwa masih banyak komponen-komponen lain yang harus disinergikan dengan produk-produk aturan yang telah ada. Agama atau lingkungan, misalnya.

Menurut Guru Besar Sosilogi UGM ini, yang terpenting dalam penyelesaian masalah anak kos-kosan adalah faktor lingkungan. Mengingat, lingkunganlah yang paling berperan untuk membentuk kepribadian anak kos. "Yang terpenting adalah pengaturam lingkungan, baik media masa, internet serta acara televisi," ujarnya. Selain itu, pengaturan-pengaturan terhadap anak kos seharusnya diatur lewat intitusi agama.

Anthony | Nurdin

Bersama Merengguk Keharmonisan

abib/bal

Berbagai jenis pondokan tersedia untuk mahasiswa Salah satunya asrama. Bagaimana kehidupan di dalam asrama? Dan apa yang membedakannya dengan jenis pondokan lain?

Ternyata tidak sedikit mahasiswa yang memilih asrama sebagai tempat tinggal. Menurut pandangan umum, peraturan yang diterapkan pengurus asrama lebih ketat dibandingkan dengan kos-kosan. Namun hal tersebut ternyata tidak menghalangi seorang mahasiswa untuk memilih asrama sebagai huniannya. Dibandingkan dengan kos biasa, tarif untuk menghuni asrama jauh lebih murah. Sriyanto, Mahasiswa Fak.Kehutanan'99 ini, mengungkapkan bahwa faktor utama yang mendorongnya lebih memilih Asrama Putra UGM Cemara Lima adalah biayanya yang murah. Di Asrama Cemara Lima, misalnya, seorang mahasiswa cukup membayar Rp 50.000,00/bulan. Sebagai perbandingan, tarif sewa di kos mahasiswa biasa dimulai pada kisaran Rp 100.000,00/ bulan.

Alasan senada juga diamini oleh Asbullah Muslim, salah satu penghuni Asrama Putra NTB. "Mayoritas warga di asrama ini berasal dari kalangan tidak mampu, dan alasan itulah yang membuat mereka memilih asrama sebagai tempat tinggal, begitupula saya," ujarnya.

Tarif sewa asrama memang lebih murah. Tetapi tidak sembarang orang bisa menghuninya. Untuk menjadi seorang warga asrama tidak semudah yang dibayangkan.

Sebelum menjadi warga asrama, seorang calon harus melewati beberapa proses. Antara asrama yang dimiliki pemerintah daerah dengan asrama yang dimiliki institusi pendidikan pun berbeda

Asrama yang dimiliki institusi pendidikan mewajibkan calon warga asrama memenuhi persyaratan seperti mengisi formulir pendaftaran, mengumpulkan foto, kopi kartu keluarga, dan transkrip Indeks Prestasi (IP). Sedangkan di asrama daerah, calon warga asrama haruslah mahasiswa yang berasal dari daerah tersebut. Paguyuban Mahasiswa Papua, misalnya, hanya menerima warga yang sudah diseleksi di daerah asal dengan kuota terbatas.

Berbeda dengan jenis pondokan lain, asrama menerapkan masa pengenalan. Asrama Putri Daerah Cut Nyak Dien dan Asrama Putri UGM Ratnaningsih contohnya. Kedua asrama yang terletak di bilangan Sagan ini mewajibkan warga barunya untuk melewati masa pengenalan, yang disebut karantina, selama tiga bulan. Kegiatan ini dilakukan agar calon warga mengenal lingkungan tempat tinggalnya, baik dengan sesama warga asrama, bangunan tempat mereka tinggal, maupun lingkungan masyarakat tempat asrama itu berada.

"Dulu proses adaptasi warga baru dengan pelonco, tapi sekarang sudah tidak ada dan lebih fleksibel," tutur Azmi, ketua pengurus Asrama Ratnaningsih. Model perpeloncoan yang pernah misalnya dengan mewajibkan warga baru mengumpulkan tanda tangan dan menanyakan hal-hal yang sifatnya paling pribadi pada warga asrama lama. Tak jarang kesulitan ditemui, ini terjadi karena sifat warga yang satu dengan lain berbeda.

Proses adaptasi pun tidak sia-sia

dilakukan. Proses tersebut memudahkan warga baru untuk cepat akrab. Dalam kehidupan sehari-hari, berbagai cara dilakukan warga asrama agar warga merasa betah tinggal di asrama. Salah satunya seperti yang dilakukan warga asrama Cemara Lima. Sore itu, ketika BALKON berkunjung, sekumpulan remaja putra terlihat sedang asyik bermain bola voli.

Hal serupa juga dilakukan di Asrama Putri Aceh milik Yayasan Cut Nyak Dien. Warga asrama ini kerap melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan bidang kebudayaan dan keagamaan, seperti pentas seni tari dan kegiatan memperingati hari-hari besar agama.

Kerapnya asrama melakukan kegiatan ternyata tidak menjamin terjalinnya hubungan pertemanan yang baik. Konflik-konflik antar warga asrama-pun ada kalanya pernah terjadi. Jumlah warga asrama yang banyak dan perbedaan karakter tiap warga adalah ihwal penyebab terjadinya konflik. Seperti yang pernah terjadi di Asrama Putra Nusa Tenggara Barat (NTB). Asbullah Muslim, wakil ketua pengurus Asrama Putra NTB ini mengakui bahwa di asrama tersebut pernah terjadi konflik.

Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga ini bercerita bahwa dulu pernah tercipta kondisi yang tidak sehat di lingkungan asrama. Salah satunya terjadi karena adanya perbedaan etnis, yaitu etnis Sasak, Samawa, dan Mbojo. Konflik antar etnis yang memang telah lama mengakar di daerah asal mereka, terbawa juga dalam kehidupan di dalam asrama. Akibatnya, timbul jurang pemisah antar warga asrama dan tercipta kelompok-kelompok berdasarkan latar belakang etnis. Bahkan, konflik tersebut sampai menimbulkan bentrok fisik antar warga. "Namun dua tahun belakangan ini hal itu tidak terjadi lagi karena telah diadakan islah (perdamaian-*Red.*) antara kelompok yang bertikai," ujar Asbullah.

Keakraban ternyata tidak hanya terjalin antar warga asrama. Hubungan yang harmonis pun tampak terjalin antara mahasiswa dengan masyarakat sekitar. Warga asrama tidak segan-segan menyingsingkan lengan baju bergabung dengan warga sekitar untuk kerja bakti. "Kami selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan masyarakat sekitar, misalnya pada acara 17 Agustus-an, dan gotong royong membersihkan lingkungan kampung." Tambah Asbullah lagi.

Interaksi yang terjalin dengan baik dengan warga sekitar, membuahkan hasil yang bermanfaat bagi warga asrama. Warga asrama Cut Nyak Dien contohnya. Kehidupan asrama tersebut diperhatikan oleh masyarakat sekitar. "Kami merasa aman dan nyaman tinggal di asrama, karena dikontrol masyarakat sekitar," tutur Siti Mutmainah.

Kehidupan di asrama tidak seseram yang dibayangkan. Bahkan suasana akrab kental mewarnai interaksi antar warga asrama. Peraturan memang ada, seperti peraturan di Asrama Mahasiswa Sam Ratulangi. Seperti yang diungkapkan ketua pengurusnya, Fredy Tahmarindang. Peraturan di sana tidak diterapkan secara kaku. "Yang penting *check and balance*, walaupun tidak diformalkan, misalnya peraturan tentang jam malam," katanya.

Peraturan memang telah dibuat dan ditetapkan oleh pengurus asrama, meski demikian ada beberapa asrama yang tidak terlalu menerapkan aturan dengan ketat. Keadaan seperti ini dapat ditemui di Paguyuban Mahasiswa Papua. "Untuk jam malam, waktunya bebas. Karena keperluan orang kan banyak dan tidak tentu waktunya," tutur Ricky, ketua pengurus Paguyuban Papua.

Warga asrama diatur dengan sejumlah ketentuan dari pengurus. Tapi murahnya biaya dan kentalnya keakraban menjadi daya tarik bagi mahasiswa untuk tinggal di asrama.

Teristy, Angga

Menekuni Bisnis Dari Bilik Kos

Bagi sebagian umum mahasiswa, kamar kos mungkin sekadar tempat tinggaltempat melenakan badan setelah seharian berkegiatan. Tapi tunggu dulu. Siapa kira, di samping bermanfaat sebagai tempat tinggal, kamar mungil seukuran 3X3 meter itu nyatanya memiliki cerita lain seputar dunia usaha mahasiswa. Ragam bisnis kecil-kecilan bermula dari "ruang sempit" itu.
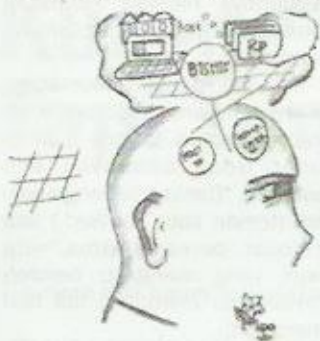
Rak plastik bertingkat warna coklat tepat berada di samping pintu. Di bagian atas, deret kartu perdana dari harga paling murah hingga paling mahal ditata rapi. Di sebelah bawah, beberapa buah kamera selam. Tumpukan *CD blank* tampak berserak di depan seperangkat komputer. Barang-barang itulah yang menjadi komoditas dagang Mustaqim Amna, Mahasiswa Fak. Psikologi UGM angkatan 2002.

Bisnis Arek Kediri, Jawa Timur, ini bermula dari kosnya di Komplek Q, di bilangan Krapyak. Mulanya, salah seorang rekan kos membutuhkan bantuan dana untuk biaya kuliah. Kebetulan, kemudian terbersit keinginan untuk membangun bisnis patungan. Maka dibikinlah outlet Voucher isi ulang dan perdana serta barang pernak-pernik yang lain, dan perakitan komputer sekaligus.

Mustaqim mengaku, usaha yang mereka tekuni amat berkaitan dengan kemampuan masing-masing. Umpamanya, salah seorang teman memiliki kemampuan merakit komputer, sebab memang kuliahnya di jurusan Teknik Informatika. Ada juga yang pandai manajemen. "Jadi kami saling *sharing* pengetahuan dan ilmu," tambah Mustaqim.

Begitu juga cerita bisnis yang dilakoni Sarah Fatikasari, mahasiswi angkatan 2001 Jurusan Akuntasi Fak. Ekonomi UPN 'Veteran' Yogyakarta. Bedanya, kalau Mustaqim memaksimalkan kamar kos untuk dagangan kartu perdana, Sarah memanfaatkan kos sebagai "pabrik" kerajinan tangan yang dibikinnya sendiri. Dari kamar kos di Jl. Nusa Indah no.15, Condong Catur itu, dia meracik benang-benang woll dengan tambahan aksesoris mutiara plastik menjadi sebuah tas yang cantik.

Sehari-hari, kamar Sarah nampak berantakan laiknya "kapal pecah". Ceceran benang, mutiara, jarum, dan bahan lainnya seperti berebut tempat dengan tak keruan. Bahkan, saking amburadulnya barang-barang di dalam kamarnya, pernah suatu kali tanpa disengaja, Sarah tertusuk jarum ketika hendak berbaring di kasurnya. "Pernah *sih*, waktu mau tiduran di kasur tertusuk jarum yang tercecer, " cerita Sarah sambil *nyengir*.

Tetapi, baik Mustaqim maupun Sarah sama-sama tak mempersoalkan kondisi kamar yang kerap berantakan itu. "Aku *sih gak* masalah. Barang daganganku aku simpan di rak ini," tukas Mustaqim sambil menunjuk rak plastik bertingkat yang ada samping meja belajarnya. Seperti sudah terbiasa dengan keadaan, bagi Mustaqim, suasana kamarnya yang awut-awutan masih tetap nyaman untuk belajar. Tatkala harus menghadapi ujian, "kamar kerja" Mustaqim berubah menjadi kamar belajar dan tempat mengerjakan tugas-tugas kuliah.

Bagaimanapun mereka sadar dan menempatkan kuliah sebagai hal yang utama. Meski mengaku aktif kuliah, namun mereka juga tidak memungkiri lebih senang tinggal di kos untuk menjalankan bisnis. Prinsip macam itu, setidaknya masih dipegang teguh oleh Sarah. "Kuliah adalah hal yang penting. Ini hanya sekedar mengisi jam-jam kosong dikos,"kata gadis manis berperawakan kuning langsat ini. Meski demikian, bisnis yang dijalani Sarah cukup membantu pengeluaran bulanannya. Dalam sebulan, keuntungan yang dapat dipungut Sarah dari penjualan tas paling

sedikit Rp. 200 ribu, dengan harga tas berkisar di atas Rp.70 ribu.

Lepas dari minimnya ruang yang tersedia, berbisnis dengan mengandalkan kamar kos sebagai tempat usaha bisa dibilang cukup menguntungkan. Sebagai permulaan usaha, hubungan pertemanan yang sudah mengental diantara teman-teman sekos dapat diandalkan sebagai modal relasi. Konsumen dapat terjaring dari mulut ke mulut (*getok tular*) melalui obrolan teman-teman kos. Bisa juga, seperti pengalaman Sarah, konsumen datang karena "promosi" yang dilakukan oleh ibu kos. "Ibu kos yang ngomong ke ibu-ibu yang lain waktu arisan," aku Sarah. Dari sana beberapa order diterimanya.

Tak hanya itu, kamar kos juga terhitung lebih efisien karena dapat mengirit uang untuk sewa tempat usaha. Hal ini diungkapkan oleh Nugroho Arif P., Mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika pada sebuah PTS di Yogja. Menurutnya, bekerja sebagai seorang *programmer* tidak membutuhkan mobilitas keluar yang terlalu tinggi. Dengan alasan itu, ia memilih melakukannya di kamar kos yang berukuran 3x3 meter itu. Kini Arif tinggal di Jl. Ring Road Utara, Pugeran Maguwoharjo.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Sarah. "Lebih murah dari pada kita membuka tempat usaha lain. Kan di kos kita hanya bayar kosnya *doang*," kata Sarah. "Di kos penjagaannya juga lebih aman, "lanjutnya. Tetapi yang terpenting mungkin tingkat fleksibilitas yang mudah diatur. Bisa beristirahat dengan bebas, tak aturan waktu kerja yang membelenggu, dan tanpa bentakan dari atasan.

Sibuk mengurusi bisnis dan kuliah akhirnya berdampak pula pada relasi individu sesama penghuni kos-kosan. Mustaqim menyadari hal ini. Kos Mustaqim memang tergolong besar, terdiri dari dua lantai yang dihuni sekira empat puluhan mahasiswa. "Aku tidak begitu kenal dengan beberapa teman (kos-*Red.*), masalahnya mereka kelihatan sibuk dan jarang ketemu," tuturnya.

Berbeda dengan Mustaqim, kos Arif dan Sarah tergolong lebih akrab. Mungkin karena jumlah kamar tidak sebanyak kos Mustaqim. "Bahkan kadang anak-anak (teman satu kos-*Red.*) ikut membuat bersama-sama,"kata cewek yang mengaku beroleh keterampilan membikin tas dari neneknya itu.

Begitulah sarah, Mustaqim, dan Arif berkreatif dengan kamar kos mereka. Bukan sekadar menggunakan kos dengan cara klasik sebagai tempat berteduh dan belajar. Tetapi juga membangun ladang bisnis yang menguntungkan. Anda mau menirunya?[]

Adi | Ryan

Kurang Bebas Tapi Tentram

abib/bal

Ilmuwan dan kaum terpelajar, dengan segala hormat atas keyakinanya itu, berusaha menjauhkan masalah moral dan agama dalam keseharian mereka. Mendekati sekulerisme. Cendekiawan mencoba menjadi objektif dalam setiap pandangannya. Menyingkirkan dogma agama dan moralitas dalam cakrawala perspektifnya. Setidaknya itu yang dapat ditangkap dari Karen Armstrong dalam bukunya yang terkenal, *The History of God*.

Di Jogja, bila kita ingin menggunakan ungkapan hiperbolis, kaum intelektual dan terpelajar dapat kita temui di setiap sudut kota. Setiap tahunnya, arus masuk manusia ke Jogja tidak kurang dari enam ribu orang untuk berbagai macam keperluan. Namun, yang paling banyak dilakoni oleh para pendatang tersebut di Jogja adalah aktivitas menimba ilmu. Hal ini tentu tak lepas dari image Jogja sebagai kota pelajar atau kota mahasiswa. Kuantitas yang memadai serta kualitas yang dianggap bagus pada berbagai perguruan tingginya, semakin memperkuat daya tarik Jogja sebagai tempat tujuan untuk kuliah. Secara tak langsung, anggapan masyarakat yang seperti itu sebenarnya merupakan indikasi pengakuan bahwa Jogja adalah barometer pendidikan di Indonesia
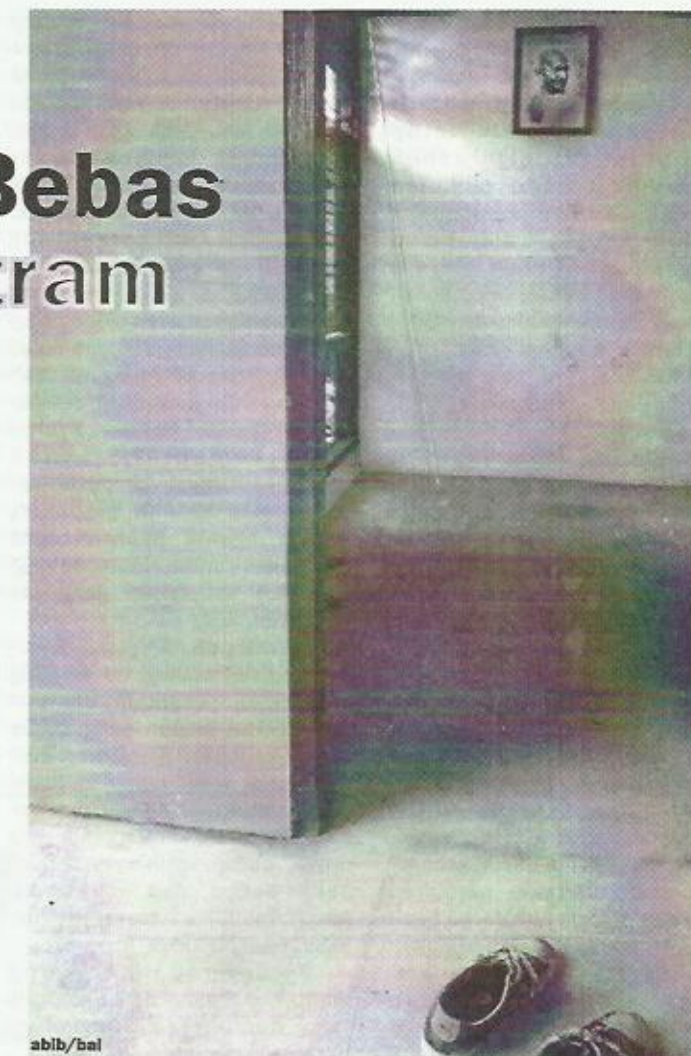
Dari sektor pendidikan itulah, kemudian tumbuh dan berkembang berbagai sektor lainyang sebenarnya merupakan respons alami terhadap kedatangan mahasiswa-mahasiswa 'interlokal' di Jogja. Dalam hal ini, penyediaan tempat tinggal sementara bagi mahasiswa nampak sebagai sektor yang sangat berkembang. Sejauh ini kos-kosan merupakan tempat tinggal sebagian besar mahasiswa. Namun begitu, asrama alternatif bernuansa keagamaan yang muncul di beberapa sudut kota Jogja juga banyak menjadi pilihan.

Hal ini jelas menafikan argumen Karen Armstrong di atas. Di Jogja setidaknya, kaum intelektual masih "menyimpan" Tuhan dalam tempat tinggalnya. Di tengah dinamika sistem

kehidupan dunia yang mulai bergerak ke arah sekularisme, tampak jelas geliat asrama-asrama keagamaan menyiapkan penghuninya untuk tetap menjunjung tinggi aspek religiositas sebagai landasan berpijak. Asrama keagamaan adalah tempat calon-calon pengemban amanah negara tumbuh dan belajar membekali diri dan menyeimbangkan kebutuhan material dan spiritual untuk menyongsong hiruk-pikuk masa depan.

Pesantren misalnya, sebagai salah satu bentuk asrama keagamaan dan juga merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Dalam perkembangannya pesantren tetap kokoh dan konsisten mengikatkan dirinya sebagai lembaga pendidikan dan tempat tinggal yang mengajarkan dan mengembangkan nilai-nilai Islam. Hal yang tak sebagaimana lazimnya kos-kosan, yang hanya menyediakan sarana untuk tempat tinggal.

Meski tak dijuluki sebagai kota santri, ternyata pesantren yang ada di Jogja jumlahnya tidak terlalu sedikit. Sebut saja pesantren Al Munawwir, pesantren Al Muhsin dan pesantren Ali Maksum di Krapyak, pesantren Taruna Al Qur'an di Lempongsari, pesantren Nurul Ummah di Kotagede, pesantren Al Lukmaniyah di Umbulharjo, pesantren At Taqwa di Kauman, pesantren UII di Seturan, pesantren Darul Hira', pesantren Wahid Hasyim, dan beberapa pesantren lainnya yang tersebar di seantero Jogja.

Kuliah di kampus dan "nyantri" di pesantren, itulah aktivitas yang dilakoni oleh sebagian mahasiswa di Jogja. Atas pertimbangan apa sebenarnya yang membuat mereka lebih memilih untuk tinggal di pesantren daripada di kos-kosan? Syaiful Anam, santri di pesantren Taruna Al Qur'an, mengungkapkan bahwa ia lebih suka tinggal di pesantren karena lingkungannya yang ia anggap baik, kekeluargaan, serta Islami. Syaiful yang sebelumnya juga sempat tinggal di kos, merasa hidupnya lebih baik sejak tinggal di pesantren. Mengenai privacy untuk belajar, mahasiswa Teknik Mesin UGM '03 ini menganggap bahwa hal itu tergantung individunya masing-masing. Hidup sekamar dengan 8 orang bukanlah sebuah alasan bagi terbengkalainya tugas-tugas kuliah. Menyinggung masalah kos-kosan yang rawan dengan pergaulan bebas, Syaiful berkomentar, "Inilah positifnya tinggal di pesantren daripada di kos. Di pesantren, aturan agama secara tegas diterapkan untuk membentengi kita dari kebebasan yang tak terkontrol."

Sementara itu, Eko, mahasiswa Psikologi UII '01 yang mondok di pesantren UII, pun menuturkan alasan yang cukup arif, "Pesantren menjadi pilihan awal saya sejak hidup di Jogja. Selain untuk menjaga diri dari hal-hal yang di luar kemampuan saya untuk mengendalikannyaseperti seks bebas dan narkobadi pesantren UII ini biayanya *free*, alias gratis." Ujarnya.

Berbeda dengan yang dituturkan Syaiful dan Eko, Idris yang dulu pernah tinggal di pesantren sampai lulus SMA justru mengaku tidak mau tinggal di pesantren di Jogja. "Di Jogjakarta ini kebanyakan pesantren kecil yang salafiyah (tradisional), pesantren yang begitu biasanya peraturannya ketat sekali," mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM'03 ini mengemukakan alasannya. Merasa enggan tinggal di pesantren, untuk tetap menemukan lingkungan yang religius Idris memilih tinggal dan berpindah dari masjid ke masjid walaupun sudah mempunyai tempat tinggal (kos) tetap.

Rasa aman, tentram, tenang, dan damai, adalah sesuatau yang didamba oleh mahasiswa yang berada jauh dari kampung halamannya. Inilah juga yang menjadi alasan untuk mondok di pesantren sembari kuliah. Aqtavia, santriwati kompleks Q pesantren Al Munawwir yang kuliah di Fakultas Pertanian UGM '03, benar-benar merasakan hal itu. Menurutnya, rutinitas yang diagendakan pesantren memberinya ketenangan batin. Kegiatan di pesantren Al Munawwir itu antara lain sholat berjamaah, mengaji diniyah, mengaji Al Qur'an, mujahadah (dzikir bersama), dan gotong-royong membersihkan pesantren "Pokoknya tiada hari tanpa mengaji, sholat jamaah, belajar." kata Hukmi, teman Aqtavia sesama santriwati.

Asrama yang bernuansa agamis agaknya tidak hanya tersedia bagi mereka yang beragama Islam. Asrama Syantikara, misalnya. Asrama yang berlokasi di Samirono ini bernaung di bawah Yayasan Katholik Tarakanita. Di dalam asrama yang khusus untuk mahasiswi ini terdapat 21 kamar, dengan penghuni asrama yang berjumlah sekira 120 orang.

Kristi, salah seorang penghuni asrama yang juga tercatat sebagai mahasiswi Fakultas Farmasi UGM '03 mengatakan bahwa, "Di Syantikara, saya sebagai mahasiswa dari luar Jogja merasa hidup jadi lebih terjamin daripada tinggal di tempat lain. Terutama soal makannya." Meskipun demikian, mahasiswi asal Semarang ini tak memungkiri bahwa suasana kamar yang berisi 8 orang terkadang membuat aktivitas belajarnya terganggu. "Tetapi secara umum hal-hal disini sangatlah positif bagi saya. Peraturannya bagus dan mendidik, serta mengajak untuk lebih taat beragama", ujarnya berkesimpulan.

Sebagaimana di pesantren, peraturan atau tata tertib yang ketat memang telah menjadi pakem dan ciri khas di Syantikara. Hal ini tentulah bisa sangat positif, karena menjadi semacam kontrol sosial bagi mahasiswi penghuni asrama. Tetapi, ada juga penghuni

asrama yang mengeluhkan hal itu. "Ada beberapa aturan yang terlalu mengikat, sehingga saya *sering* kucing-kucingan dengan suster pengawal di sini," ujar Mitha, mahasiswi MIPA '02. Ketika ditanya lebih jauh mengenai bentuk konkret dari peraturan itu, Mitha menambahkan, "Misalnya saja, di sini tidak boleh bawa *handphone*, sehingga adakalanya komunikasi sedikit terhambat." Namun, usai berbicara begitu ia buru-buru berujar, "Tapi bagaimanapun aturan-aturan itu demi kebaikan saya juga." Bagi Mitha, sejauh ini Syantikara adalah pilihan terbaik baginya. Menurutnya, ia lebih merasa ngeri apabila hidup di luar asrama lantaran banyaknya kasus seperti kos-kosan yang tidak terawasi secara layak, sehingga kemudian sering timbul hal-hal negatif.

Aturan yang mendasar, setidaknya juga diterapkan di Ashram Gandhi, sebuah asrama keagamaan Hindu yang bertempat di Pogung Lor. Di asrama ini misalnya, penghuni asrama tidak boleh merokok dan tidak boleh makan daging (*vegetarian*). Tapi justru dengan aturan-aturan semacam itulah, para penghuni Ashram Gandhi merasa dirinya ditempa agar dapat menjalani hidup dan menyikapinya secara lebih baik. Gede Sukadana, mahasiswa Geologi UGM '99, mengakui hal itu. "Dengan aturan yang ada di sini, hidup saya menjadi lebih terkontrol, disiplin, dan teratur", tukasnya. Hal senada diungkapkan Bagus, mahasiswa Arkeologi UGM '03, "Kalau dulu susah dinasehati orang, sekarang setelah tinggal di Asrama Gandhi saya jadi lebih bisa mendengarkan orang."

Ashram Gandhi yang didirikan sejak tahun 1998 itu, sekarang dihuni oleh 5 orang mahasiswa. Bernaung di bawah Yayasan Balisantisena, Ashram Gandhi berusaha mewujudkan bagaimana supaya "Bali itu tampak di Jogja". Tetapi di dalam artian, tidak hanya berorientasi pada pelestarian tradisi Bali saja, melainkan juga menjaga relevansinya dengan esensi ajaran Hindu. Maka itulah, penghuni Ashram Gandhi mempunyai aktivitas yang berupa pendalaman terhadap ajaran Hindu, yakni melalui sembahyang dan kajian-kajian keagamaan.

Apapun bentuk dan namanya, asrama-asrama ini menawarkan alternatif tempat tinggal yang menarik. Rasa aman dan kedekatan kepada Tuhan menjadi daya tarik utama intelektual muda untuk menjadi penghuni asrama agama ini. Dan tentunya, rasa aman ini juga memberi rasa tenang bagi orang tua mahasiswa di kampung halaman.[]

Imung | Andi

Menggadai Privasi Demi Organisasi

Mahasiswa yang tinggal di sekretariat sebuah organisasi memiliki romansanya sendiri. Inilah kisah mereka.

abib/bal
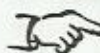
Malam itu, waktu menunjuk pukul 19.30. Sebuah rumah di daerah Karangmalang, tepatnya di rumah nomor B18b, tampak ramai. Sekira lima orang duduk di ruang tengah. Tak lama, beberapa orang mulai berdatangan. Sejurus kemudian, sekira sepuluh orang telah duduk melingkar di ruangan itu. Perbincangan dimulai. Malampun mulai hangat dengan perdebatan. Rupanya mereka tengah membahas tema yang akan diusung pada aksi di depan rektorat esok hari.

Cukup lama berselang. Waktu telah melarut. Mereka mulai lelah. Pertemuan di sekretariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UNY itu diakhiri dengan sebuah keputusan. Esok hari, mereka akan melakukan aksi. Beberapa dari mereka mulai meninggalkan forum itu. Pulang ke kos masing-masing. Sedang yang lain tetap tinggal untuk sekadar istirahat melepas penat, atau begadang meneruskan diskusi. Beberapa juga terlihat mulai merebahkan diri untuk kemudian menutup mata.

Kegiatan seperti inilah yang sering kita temui di sekretariat gerakan mahasiswa. Diskusi, rapat, eksplorasi tema, hingga perumuskan perangkat aksi demi sebuah perjuangan. Dari rumah kontrakan inilah sebuah aksi heroik dirancang.

Aktivitas seperti itu tidak bakal kita jumpai di kos-kos mahasiswa biasa. Aktivisme semacam ini hanya bisa di temui di kos, atau kontrakan, yang sekaligus berfungsi sebagai sekretariat sebuah organisasi pergerakan.

Banyak mahasiswa yang tidak mau terjebak dalam rutinitas kuliah. Mereka ingin mencoba sesuatu yang lain di luar bidang akademikya. Tengok saja aktivitas mahasiswa yang tergabung dalam KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), IKMK (Ikatan Keluarga Mahasiswa Kristen), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), dan organ-organ gerakan lainnya. Keseharian mereka selalu diisi dengan wacana, diskusi, kajian agama, kegiatan advokasi, dan pengorganisasian massa. Atau coba lihat sanggar budaya dan seni semacam Sanggar Suto. Setiap hari, mereka menyibukkan diri dengan latihan teater.

Setiap organisasi maupun komunitas, umumnya, memiliki sekretariat. Yakni ruang atau rumah yang berfungsi sebagai tempat berkumpul bagi para pegiatnya. Dari kos yang hanya berukuran 3x3 meter, hingga rumah kontrakan yang terdiri dari beberapa kamar. Uniknya, selain berfungsi sebagai sekretariat, ruang-ruang itu juga menjadi tempat tinggal tetap bagi beberapa pegiatnya. Contohnya Felli Hikmat, Mahasiswa Komunikasi'99 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM. Ia adalah salah satu pegiat KAMMI Komisariat UGM yang tinggal di sekretariat.

Siklus hidup pegiat sebuah organisasi tentunya lebih kompleks dari mahasiswa pada umumnya. Tidak sekadar kos, kampus, dan perpustakaan. Pagi hari, selain harus mengikuti jadwal kuliah, mereka juga disibukkan dengan urusan organisasi. Siangnya, rutinitas organisasi juga harus diikuti. Dari diskusi, rapat, atau pelatihan. Malam hari yang semestinya menjadi waktu belajar dan istirahat, seringkali, juga harus direlakan demi organisasi. Maka tak heran bila padatnya kegiatan sering memunculkan banyak keluhan.

Untuk menyiasati kepadatan itu, beberapa organisasi menerapkan aturan tertentu di sekretariatnya. Aturan ini terkait dengan jadwal kegiatan yang mereka lakukan di sekretariat. Sanggar Suto misalnya. Aktivitas anggotanya praktis dilakukan setelah mereka selesai kuliah. "Ya praktis kegiatan latihan dan lainnya baru kita mulai pukul 16.00," aku Iwan, Direktur Artistik Sanggar Suto. Kegiatan mulai dari teater, seni rupa, seni musik, seni sastra, dan sebagainya dimulai pada sore hari. Diskusi juga kerap dilakukan. Biasanya, mereka

mendiskusikan tema-tema yang akan dilakonkan untuk pementasan. Iwan, yang juga penghuni tetap sekretariat Sanggar Suto, mengaku bahwa eksplorasi ide dan juga pembuatan naskah sering dilakukan hingga larut malam. Akibatnya, mereka sempat mendapat teguran dari masyarakat sekitar. Kini mereka harus sudah mengakhiri kegiatan di sekretariat sebelum pukul sepuluh malam.

Lain halnya dengan para aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Komisariat (KAMMI) UGM. Kegiatan di sekretariat, di Jalan Kaliurang km 5,6 Gang Pandega Wiratama F 53c itu, lebih difokuskan pada siang hari. Hal ini dilakukan karena kegiatan organisasi ini selalu melibatkan kaum putrinya. Dalam aturan organisasi, ikhwan dan akhwat (bahasa arab untuk putra dan putri-*Red.*) tidak boleh berdekatan dan bertatap muka secara langsung. Apalagi sampai bermalam bersama. "Karena melibatkan akhwat, jadi tidak sampai malam hari," ungkap Feli Hikmat, salah satu penghuni tetap di sekretariat tersebut. Dengan alasan itu pula, berbagai kegiatan harus segera diakhiri sebelum pukul 18.00. Pada waktu malam, sekretariat itu terlihat lengang. "Kalau malam sih jadi anak kos biasa, ngobrol sama teman-teman, makan bareng, itu aja," tambah Feli yang ketika ditemui BALKON sedang berada di sekretariat sendirian.

Sama ketika BALKON berkunjung ke Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Sleman. Sekretariatnya terlihat sepi. Hanya ada satu orang yang berada di sana. "Masih pada keluar mas," ujar Arif Rahman Hakim, anggota HMI yang sempat menjadi penghuni sekretariat itu selama dua tahun. Bedanya, aturan yang terapkan di sekretariat ini relatif lebih longgar. Rapat dan berbagai diskusi bisa dilakukan hingga larut malam. "Terkadang kita melakukan rapat hingga tengah malam," tambah Mahasiswa Fak.Kehutanan'02 yang akrab disapa Hakim ini. Sekretariat yang berada di Jl. Kaliurang km 4 Gang Kinanti 11A ini dihuni oleh .tujuh orang mahasiswa. Mereka adalah pengurus dan anggota organisasi tersebut.

Hampir sama dengan HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UNY terbilang longgar dalam menetapkan aturan. Mereka bebas melakukan kegiatan dari pagi sampai malam. Tidak ada batasan untuk melakukan kegiatan di sekretariat mereka. Selain diskusi, berbagai kegiatan juga kerap dilakukan. Dari pelatihan komputer grafis, outbond, maupun pengajian. Yang terakhir ini tak jarang melibatkan warga yang tinggal di lingkungan sekitar.

Tinggal bersama banyak orang dalam sebuah kontrakan, sekaligus sekretariat, tentu bukan pilihan yang mudah. Ini terkait dengan kehidupan pribadi mereka yang membutuhkan ketenangan dan kenyamanan. Persoalan privasi menjadi hal yang menarik untuk diulas. Sebagai penghuni sekretariat, mereka 'harus' merelakan privasi demi kepentingan organisasi. Semua anggota bebas keluar-masuk di sana. Bahkan kamar tidurpun menjadi milik umum."Semua bisa keluar masuk *dengan bebas ke kamarku*, soalnya perpustakaan ada di situ," ujar Feli. Kamar tidur juga sering dijadikan sebagai ruang rapat. Akibatnya, kebebasan untuk beraktivitas di kamar jadi terbatas.

Namun, kondisi yang demikian rupanya tidak terlalu dipersoalkan. "Kami sadar bahwa kami berada di tengah sekian banyak anggota yang setiap hari datang dan pergi silih berganti," ujar Lujianto, salah satu penghuni tetap sekretariat PMII komisarit UNY. Hal senada juga diungkapkan oleh Hakim, Iwan, dan Feli. Sejak awal mereka telah diminta untuk siap merelakan privasi. Bahwa di sana nanti tidak ada ruang pribadi dengan porsi besar. Bahwa di sana akan berlaku sistem sosialis. Milikmu adalah milikku dan milikku adalah milikmu. Rokok, pulsa, kendaraan pribadi, kamar tidur, menjadi milik bersama. Begitulah keseharian mereka.

Kegiatan yang begitu padat menjadi rutinitas yang 'harus'mereka ikuti, enak maupun tidak. "Itu bagian dari konsekuensi kami yang tinggal di komisariat ini," kata Lujianto. Tetapi mereka selalu punya cara untuk mengatasi itu semua. Misalnya dengan berjalan-jalan santai keluar. "Kalau suntuk kami pergi keluar. Kadang ke alun-alun utara Kraton Jogja," ujar Iwan. Mereka juga mengaku saling curhat antar penghuni. Sekadar berbagi masalah untuk mengurangi beban.

Itulah bagian dari "kesengsaraan" yang mereka rasakan sebagai penghuni kontrakan sekaligus sekretariat. Mereka sadar betul tentang itu. "Minimal, ini akan menjadi pengalaman yang berharga untuk bekal masa depan," ujar Lujianto sembari menerawang. Susanna Tamaro, penulis terkemuka Italia, dalam bukunya *Va' dove ti porta il coure* (pergilah kemana hati membawamu), meski tidak sama persis, menulis keadaan itu dengan bahasa yang indah. "Siapapun yang meninggalkan usia remaja tanpa terluka tak pernah bisa menjadi orang dewasa yang sempurna"(hlm 33, penerbit Gramedia, 2004).

Tidak selamanya penghuni sekretariat sebuah organisasi terganggu dengan berjibun kegiatan yang ada. Banyak hal positif yang dirasakan. Banyak teman, pengalaman, pengetahuan, dan wacana. Mereka sadar, selagi masih muda, harus ada sesuatu yang ditorehkan dalam perjalanan hidupnya. Mencoba menjadi generasi yang peka terhadap kondisi dan realitas masyarakat.[]

Ryan

"Harus Ada Upaya untuk Mendesak Pemerintah"

Kebijakan kenaikan biaya pendidikan tinggi, terutama di UGM, telah menjadi perhatian banyak pihak. Pro dan kontra mengenai kenaikan biaya pendidikan marak dibincangkan, baik dalam forum formal maupun informal. Isu seputar pendidikan pun telah milik publik. Prof. Dr. Sofian Effendi, sebagai salah satu rektor universitas yang berstatus BHMN, mencoba menjawab carut marut-nya sistem yang berlangsung dalam dunia pendidikan di Indonesia. Seperti apa peranan pemerintah saat ini sehingga biaya pendidikan harus naik? Rektor UGM periode 2002-2007 tersebut mencoba memaparkannya kepada BALKON, saat ditemui di ruang kerjanya akhir Mei lalu.

Prof. Dr. Sofian Effendi:

abib

Kebijakan seperti apa yang ditempuh UGM dalam situasi negara yang sedang transisi seperti sekarang ini?

Kita mulai dari *background* masalah yang kita hadapi.

1. Mutu. Semakin lama, kita semakin tertinggal dari perguruan tinggi di kawasan Asia. Di tingkat nasional, kita boleh dikatakan berkibar-kibar. Tapi, di tingkat regional, dari 100 perguruan tinggi unggulan, tidak ada satupun perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam top asia, termasuk UGM.
2. Akses keterjangkauan masyarakat, berdasarkan golongan ekonomi dan geografis, terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas. Kalau kita bicara pada konteks Indonesia, akses anak-anak dari keluarga kurang mampu ternyata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Saya mengamati ini mulai tahun 1978, sejak saya lulus dari Amerika Serikat. Pada tahun itu, akses anak-anak dari keluarga kurang mampu terhadap perguruan tinggi di Indonesia, pada populasi usia 19 s.d. 24 tahun hanya ± 3%. Tahun 2004, 26 tahun kemudian, masih sama. Jadi, artinya, ketimpangan akses tetap saja terjadi selama 26 tahun terakhir.
3. Otonomi. Atau kebebasan pergurun tinggi untuk mengelola dirinya sendiri. Itu juga tidak kunjung diberikan oleh pemerintah. Walaupun kita (UGM-*Red.*) di mana-mana disebut sebagai BHMN, tetapi tetap saja UGM ini seperti PTN. Akibatnya, Bupati Sleman mengatakan dalam Bernas, UGM utang 6 milliar Rupiah. Dia (Bupati Sleman-*Red.*) menganggap UGM sudah betul-betul BHMN yang berbadan hukum. Dia menyamakan BHMN dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara-*Red.*) jadi harus bayar pajak.

Standar pembiayaan yang harus kita keluarkan adalah sebesar 13,8 juta/ mahasiswa/tahun. Ini baru 70% dari standar nasional yang 18,1 juta/mhs/tahun. Walaupun kita lebih murah 40% dari standar nasional, mutu kita di tingkat nasional

tidak kalah. Tapi di tingkat Asia kita masih jauh. Biaya yang dikeluarkan UGM untuk mahasiswa adalah 1/14 dari anggaran Malaysia. 10 -15 tahun yang lalu, orang Malaysia banyak belajar ke Indonesia. Sekarang terbalik, kita yang belajar ke sana. Kenapa bisa begirtu, jawabannya ya pemerintahan Malaysia lebih perhatian pada pendidikan di negaranya. Pemerintah Malaysia mengeluarkan biaya 154 juta/mhs/tahun. Jadi semua fasilitas kelas dunia bisa disediakan. Sedangkan pemerintahan Indonesia hanya mengeluarkan 6,2 juta/mhs/tahun.

Mengapa biaya itu harus selalu dilimpahkan kepada mahasiswa?

Betul-betul. Saya sependapat dengan itu. Seharusnya dalam anggaran negara, biaya pendidikan tercatat US$18,1 juta. Namun, kenyataannya, pemerintah hanya mengeluarkan US$ 6,1 juta. Jadi kekurangannya, sebesar US$12 juta, tidak dibiayai pemerintah. Kesimpulannya, pemerintahan Indonesia memang tidak *commit* sama sekali terhadap bidang pendidikan.

Lantas, kenapa kenaikan biaya pendidikan seperti SPMA, BOP hingga SKS Variabel, selalu dibebankan pada Mahasiswa?

Ya, tapi itu masih jauh dari yang 12 juta tadi *kan*? Jadi sekarang begini, biaya per mahasiswa per tahun adalah 13,8 juta. Memang terjadi kenaikan. Ini tidak bisa tidak, karena kita jauh dari yang nasional itu. Kalau kita mau mengejar, ya tiap tahun harus kita naik. Seharusnya pemerintah juga menaikkan biaya untuk pendidikan. Menurut saya, kita suruh pemerintah subsidi 50%, sehingga pemerintah harus memberi 9 juta. Tapi dengan janji-janji yang ada sekarang ini, saya tidak yakin kalau pemerintah ke depan bisa menaikkan subsidi menjadi 50%. Kenaikan biaya memang harus terjadi karena kita jauh dari pembiayaan nasional. (US$18,1 juta/mhs/tahun-*Red.*).

Tidak ada upaya-upaya untuk mendesak pemerintah?

Bukan tidak ada upaya, tetapi tidak ada komitmen dari pemerintah.

Sedari awal Anda menyetujui kebijakan pemerintah tentang konsep BHMN?

Sebenarnya bagi UGM, BHMN adalah sejarah yang terulang kembali. Sewaktu UGM dilahirkan, statusnya adalah BHK (Badan Hukum Kepentingan-*Red.*) yang sekarang dinamakan BHMN. Pada waktu itu, sudah ada MWA, tetapi namanya Badan Waka yang beranggota, antara lain, Sri Sultan, Ki Hadjar Dewantara dll. Nama UGM waktu itu adalah Universiteit Negeri Gadjah Mada. Pada waktu itu, presiden universiteit (sebutan untuk rektor-*Red.*) adalah Pak Sardjito. Dia diangkat oleh badan wakaf. Waktu itu, UGM adalah badan universitas otonom. Setelah itu, kita berubah menjadi PTN. Sejak tahun 2000, status UGM dikembalikan ke BHMN.

Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, BHMN sebenarnya memberi kewenangan kepada universitas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu perlu bentuk Badan Hukum. Undang-Undang Keuangan Negara hanya mengenal dua bentuk badan hukum, yakni Badan Pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PTN, di sini, adalah badan pemerintah. Tapi dia juga tidak bisa menjadi BUMN. PTN *kan* bukan badan usaha *profit making*. Kita adalah lembaga nirlaba. Maka, dibuatlah badan baru, yaitu BHMN. *Nah*, karena BHMN tidak dilandasi dengan aturan hukum yang kuat, akhirnya tidak jalan sampai sekarang. BHMN diadakan hanya dengan landasan PP 61. Sedangkan PP 61 tidak bisa menganulir UU Keuangan Negara. BHMN tanpa diributkan pun jalannya sudah terseok-seok.

Yang Anda usahakan dengan konsep BHMN?

Seperti yang saya katakana tadi, BHMN itukan sebenarnya seperti memberi kewenangan pada daerah untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi pemerintah memberi kewenangan kepada universitas untuk mengurus dirinya sendiri. Dulu kurikulum kita harus disetujui oleh departemen (menteri) dan pembukaan program harus dengan izin. Pengangkatan dosen harus ke departemen pendidikan. Itu adalah kekakuan-kekakuan yang harus dihilangkan.

Berapa persen subsidi pemerintah pada UGM?

Totalnya sekira 75%. 75% dari pemerintah, 20% dari mahasiswa dan 5% dari usaha sendiri.

Anda pernah menulis di *Kompas* dengan menyebut sekian persen mahasiswa UGM yang mampu dan tidak mampu. Kalau dirunut kembali, kemampuan masyarakat Indonesia untuk masuk ke PTN sangat rendah. Bukankah BHMN akan menjadi suatu hal yang sangat sulit dijangkau?

Tak perlu mengaitkan langsung antara keterjangkauan ini dengan BHMN. Karena orang *kan* hanya melihat dari sisi negatifnya saja. Inikan *public opinion*. Opini publik *kan* bahwa BHMN itu berarti kenaikan SPP, membuka program secara serampangan, dan mengurangi akses golongan kurang mampu untuk masuk ke UGM. Ini sebenarnya tidak perlu dikaitkan langsung dengan BHMN, karena BHMN sebenarnya untuk menyelesaikan itu semua.

Kalau semata-mata mengambil dana dari masyarakat untuk menutupi kekurangan subsidi, bukankah sama dengan membiarkan pemerintah melepas tanggungjawabnya?

Ya... mari kita *pressure* pemerintah. Itu satu. Supaya dia melaksanakan pesan konstitusi. Boleh saja kita menuduh pemerintahan Megawati sekarang tidak konstitusional karena tak menepati janji untuk memenuhi anggaran pendidikan. 20% itu *kan* pesan konstitusi di luar gaji.

Sehingga wajar jika biaya dinaikkan?

Bukan begitu logikanya. Menurut saya harus diterapkan sistem yang adil. Bagi yang mampu-mampu ini, kita *charge* penuh biaya pendidikannya. Beasiswa harus kita arahkan kepada yang tidak mampu. Maka subsidi dari pemerintah kita pakai untuk mensubsidi ini (Mahasiswa tidak mampu-*Red.*). Sedang yang mampu *ya* suruh membiayai sendiri.

Soal subsidi silang. Pertanyaanya, apakah UGM bisa menjamin sekian persen mahasiswa tidak mampu akan masuk UGM? Bukankah sejak awal, mereka yang berani masuk UGM adalah mereka yang bisa membayar SPMA dan BOP?

Kita sadar bahwa SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru-*Red.*) menciptakan kondisi seperti itu. Itulah yang memaksa UGM mengadakan UM UGM (Ujian Masuk UGMRed.). Ada satu informasi yang tidak dikumpulkan dalam SPMB, yaitu kondisi ekonomi orangtua.

Sepertinya pemerintah senang jika perguruan tinggi menjadi BHMN. Apalagi dengan Sisdiknas 2003 yang mengundangkan BHP (Badan Hukum Pendidikan-*Red.*) tentang kemandirian universitas untuk menggalang dana dari masyarakat atau keleluasaan membuat usaha sendiri. Apakah jawabannya memang harus BHP?

Menurut saya iya. Saya kira tidak perlu mengkaitkan langsung antara BHP dengan biaya. Karena menyangkut kepastian hukum. Kalau PTN *kan* antara menjadi badan pemerintah dan menjadi BUMN. Kita *kan* tidak mungkin menjadi BUMN. Lain lagi dengan swasta seperti yayasan, lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang amal, atau dia menjadi perusahaan. *Nah*, sekarang ini, yayasan dalam UU yang baru lain artinya dengan yayasan dalam UU lama. Yayasan dalam UU baru tidak bisa menjadi wadah untuk PT atau lembaga-lembaga pendidikan. Yayasan sudah dianggap semacam usaha oleh UU, makanya ia dikenakan pajak. Oleh kerena itu, harus ada bentuk badan tertentu yang bebas pajak, yaitu BHP. Pemerintah itu juga sebenarnya rasional. Jadi jangan langsung dikaitkan dengan biaya. Itu dua hal yang tidak terkait. BHP memberi kepastian bahwa UGM adalah badan hukum nirlaba yang bukan subjek pajak.

Soal biaya tadi. Seandainya pun, 30% anggaran pendidikan dari APBN tidak akan cukup. APBN sekarang *kan* 360 trilliun. 30% dari 360 trilliun kurang lebih 120 trilliun. Untuk pendidikan tinggi saja, dengan 4000 mahasiswa, katakanlah dengan 18 juta/mahasiswa/tahun, maka itu saja sudah 72 trilliun. Kita belum lagi menghitung berapa juta siswa SD, SLTP, dan SLTA. Jadi 30% biaya pendidikan, kalaupun bisa dipenuhi oleh pemerintah, tetap tidak akan cukup untuk biaya pendidikan di Indonesia.

Jadi dengan anggaran 30% inipun, tingkat partisipasi masih sangat rendah. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai angka partisipasi seperti Malaysia? Karena itu, tidak mungkin biaya pendidikan di sini, sepenuhnya, di bebankan kepada APBN. *Ya* terpaksa angka partisipasi ditekan serendah mungkin supaya biayanya cukup. Sekarang masalahnya, kalau anggarannya hanya segini, prioritasnya mau ke mana? Saya sangat setuju kalau pendidikan sembilan tahun sepenuhnya dibiayai pemerintah. Tapi untuk perguruan tinggi harus ada partisipasi masyarakat. Cuma

abib/bal

masalahnya, berapa persen pemerintah berapa persen masyarakat. Kita juga harus melihat kemampuan masyarakat. Kemudian keadilan, jangan sampai yang seperti itu tadi, yang mampu kita beri subsidi sama dengan yang miskin.

Sepertinya Anda begitu mengejar target sehingga banyak yang mengatakan terlalu cepat dan kebijakan yang diambil sering tidak stabil?

Saya kira bukan target. Saya menyebutnya sebagai cita-cita yang harus benar-benar kita capai. Kita *kan* bercita-cita bahwa UGM akan menjadi perguruan tinggi yang diakui

Dan apakah dengan alasan mengejar target, kita sah-sah saja mengatakan bahwa biaya pendidikan itu harus mahal

Pilihannya kita mau maju atau tidak, memang dilematis.

1. Kita mau maju dan mengejar ketertinggalan kita
2. Bagaimana mencari biaya untuk itu, karena tidak bisa dibebankan sepenuhnya pada masyarakat. Garis besar solusinya ada 2:

a. Strategi *Social Walfare* yang diikuti oleh Negara *social welfare* di Eropa. Pencerdasan warga negara merupakan tanggung jawab negara. Berapapun ongkosnya tidak jadi soal. Di Jerman, biaya pendidikan sebesar 40.000 Euro/ mahasiswa /tahun.(Kurang lebih 360 juta pertahun*Red.*) Darimana negara dapat banyak uang? Pajaknya tinggi, dan pajak terbesar diambil dari penghasilan pemerintah.

b. Strategi yang diikuti oleh Amerika dengan sistem market. Di Amerika, biaya pendidikan tinggi ditanggung oleh masyarakat. Tugas pemerintah adalah membantu masyarakat yang tidak mampu untuk memperoleh pendidikan dengan beasiswa.

Sekarang kita mau kemana? Ikut *social welfare*, pemerintah komitmennya kecil dan tidak punya kemampuan. Tidak usah bayar 360 juta, bayar 18,1 juta saja *nggak* sanggup. Ke sistem *market*, daya beli masyarakat belum mampu. Ini pilihan. Kita harus menilai yang tengah-tengah. Menurut saya, salah satu solusinya adalah pemberian subsidi silang.

Berarti, untuk mencapai sebuah kemajuan, masyarakat harus tetap dikorbankan?

Ya, biar ada kesadaran dari masyarakat untuk membiayai pendidikan sambil sama-sama menuntut pemerintah supaya bertanggung jawab. Bagaimanapun, harus ada upaya-upaya karena tanggung jawab pemerintah terlalu kecil.[]

Iqbal | Adi | Izzah

Empat Tahun BHMN:
Lonjakan yang Fantastis

Tahun ajaran baru selalu identik dengan kenaikan biaya pendidikan. Begitu juga di UGM. Setelah BOP, SPMA, POTMA, dan SKS variabel, apalagi?
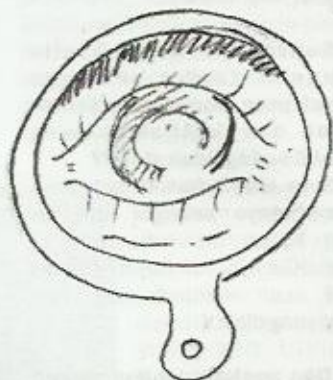
Mulanya wacana otonomi kampus merebak di tahun 1999 dengan diterbitkannya PP. No. 61 Tahun 1999. Satu tahun kemudian, diluncurkan PP. No. 153 tahun 2000 yang mentahbiskan UGM sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN).

Tentu saja ada banyak perubahan yang melanda UGM pasca BHMN, terutama pada komponen biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh mahasiswa. Sebab pemaknaan Otonomi Kampus dititik-tekankan (diredusir-*Red.*) hanya pada pelegalan pengadakan "pungutan sendiri", bukan pada kegiatan akademisnya. Pada titik ini, bertemulah dua ekstrem: kepentingan pemerintah untuk lepas tangan dan kecerdikan pengelola pendidikan (rektorat-*Red.*) untuk mengeruk uang.

Setelah berjalan selama empat tahun, ternyata status UGM sebagai PT BHMN menimbulkan kebijakan-kebijakan yang kontoversial. Tak ubahnya perguruan tinggi swasta (PTS), pihak rektorat terus mengeruk uang dari mahasiswa. Namanya bisa bermacam-macam. Setelah mungkin merasa risih selalu menaikkan biaya pendidikan dengan label SPP, istilah Biaya Operasional Pendidikan (BOP) kemudian diluncurkan. Itu di tahun 2002. Tahun selanjutnya, dilandingkan kebijakan menarik uang pangkal bertajuk Sumbangan Pengembangan Mutu Akademik (SPMA).

Hampir pasti, rektorat selalu cerdik menggunakan beragam cara untuk meningkatkan jumlah uang setoran mahasiswa tiap tahunnya. Tahun ini, Rektor UGM, Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA, mengeluarkan kebijakan anyar untuk menggemukkan kas UGM: Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dihapuskan. Sebagai gantinya rektorat menelurkan kebijakan baru: mahasiswa baru (angkatan 2004) dibebani ongkos pendidikan per-Satuan Kredit Semester (SKS), sebagaimana diterapkan PTS. Jadi, mulai tahun ajaran ini, mahasiswa baru dikenal Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik (SPMA), ditambah biaya per-SKS.

Untuk satu SKS yang diambil, mahasiswa dibebani biaya Rp.60 ribu (non eksak) dan Rp.75 ribu (eksak). Apabila kita boleh berhitung, jika rata-rata mahasiswa jurusan eksak dan non eksak mengambil 18 SKS setiap semesternya ditambah SPP tentunya, maka jumlah total biaya pendidikan yang harus dibayar tak kurang dari 1,5 juta rupiah. Tentu biaya tersebut merupakan jumlah yang amat besar. Mereka yang tak mampu sudah barang tentu tak dapat mengenyam pendidikan di UGM. Kalau dulu orang berbangga melihat UGM sebagai "kampus rakyat", kini ingatan itu hanya rekaan dan mitos. Lantas bagaimana nasib mahasiswa yang berasal dari kalangan tak mampu?

Profesi orang tua Mahasiswa

Profesi Orang Tua	1998	1999	2000	2001	2002
Petani / Nelayan	289	307	265	258	207
Buruh	80	0	0	0	0

Sumber: Universitas Gadjah Mada Dalam Angka 2002.

Mari kita hitung. Seorang mahasiswa baru UGM yang mengambil jurusan eksak diwajibkan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp. 7.035.000 dengan rincian komponen biaya sebagai berikut:

Komponen biaya yang harus dibayarkan Mahasiswa Baru 2004 jurusan eksak:

Komponen	Biaya
o SPMA	Rp.5.000.000
o SPP	Rp. 500.000
o BOP/sks	
1. Fakultas Eksata, 18 sks x Rp.75.0000	Rp.1.350.000
2. Fakultas Non Eksata, 18 sks x Rp.60.000	Rp.1.080.000
o Dana Jaminan Kesehatan dan Konsultasi Psikologi	Rp. 30.000
o Kartu Mahasiswa	Rp. 50.000
o Jaket Almamater	Rp. 50.000
o Buku Panduan	Rp. 55.000
Jumlah Total	Rp. 7.035.000

Dengan item penghitungan yang sama, mahasiswa baru jurusan non eksak akan diwajbkan membayar uang pendaftaran sejumlah Rp. 6.765.000.

Alur Kebijakan PT-BHMN UGM

Wacana Otonomi Kampus menguat seiring diterbitkannya PP. No. 61 Tahun 1999. Setahun kemudian pemerintah mengeluarkan PP No. 153 Tahun 2000 tentang PT-BHMN UGM:

Kebijakan Tahun Ajaran 2000/2001:

SPP naik dari Rp.250 ribu rupiah menjadi Rp.400 ribu rupiah.

Dibentuknya MWA (Majelis Wali Amanat). Organ tertinggi yang berfungsi sebagai wakil pemerintah dan masyarakat. Badan ini dibentuk berdasarkan Pasal 1 ayat 4 PP No. 153 Tahun 2000.

Dibentuknya PT. GMUM (GAMA MULTI USAHA MANDIRI) pada Juni 2000, yang fungsinya :

1. Mendukung kemampuan finansial UGM.
2. Mendukung pengelolaan kekayaan dan sumber daya UGM secara profesional.
3. Memperkuat jaringan UGM.

Kebijakan Tahun Ajaran 2001/2002:

·Kenaikan SPP dari Rp.400 ribu rupiah menjadi Rp.500 ribu rupiah.

Kebijakan Tahun Ajaran 2002/2003:

·Dikeluarkannya SK Rektor No.109/P/PD/2002 tentang pengenaan BOP (Biaya Operasional) bagi Mahasiswa Baru 2002 yang besarnya:

Eksakta = Rp. 750.000.00 + SPP (Rp. 500.000,00)
Non Eksakta= Rp. 500.000,00 + SPP (Rp. 500.000,00)
Asuransi Kesehatan = Rp. 25.500,00

Rektorat meluncurkan Beasiswa "UGM Peduli". Namun sayangnya, selain tak dapat memenuhi kuota mahasiswa yang tak mampu, beasiswa yang diberikan itu hanya diberikan selama satu tahun.

Pelaksanaan Program JMPT (Jaminan Mutu Pendidikan Tinggi)/ QA(Quality Assurance). Konon, tujuan program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan stake holders secara memuaskan dan tercapainya hasil layanan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kebijakan Tahun Ajaran 2003/2004:

·Tes UM (Ujian Masuk) UGM mulai diterapkan, dengan formulir yang dijual seharga Rp.75 ribu rupiah.

- SPP = Rp. 500.000,00
- BOP
  Rp. 750.000,00 (Eksak)
  Rp. 500.000,00 (Non Eksak).
- Penerapan SPMA(Sumbangan Peningkatan Mutu Akademik) yang besarnya Rp. 0 s.d Rp. 100.000.000,00
- Asuransi Kesehatan = Rp. 30.000,00

Kebijakan Tahun Ajaran 2004/2005:

- SPP = Rp. 500.000,00

BOP dihapuskan. Diganti sistem pembayaran SKS variabel yang besarnya:

Eksak = Rp. 75.000/sks/semester.
Non Eksak= Rp. 60.000/sks/semester.

SPMA = Rp. 0 rupiah s.d Rp.100 juta rupiah.

Asuransi Kesehatan = Rp. 30.000,00

Angga | Agoeng
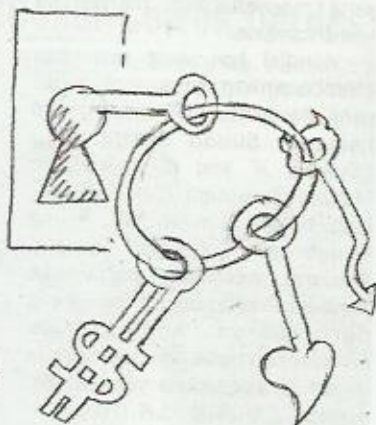
MAHASISWA PENUNGGU KAMPUS

Banyak mahasiswa pendatang di UGM. Ada yang berasal dari luar Jogja, luar Jawa, bahkan Luar negeri. Otomatis, banyak mahasiswa UGM yang harus kos di kota ini. Pilihan yang ideal untuk kos, tentu saja, adalah tempat yang sedekat mungkin dengan kampus. *Nah*, mengapa tidak kos di kampus saja? Agaknya ide inilah yang sempat melintas di kepala beberapa mahasiswa.

abib/bal

Sebenarnya dengan mudah bisa kita cermati bahwa mayoritas mahasiswa yang kos di kampus rata-rata adalah pengurus dari lembaga kemahasiswaan. Jadi bagian kampus yang mereka tempati terlokalisir pada kantor sekretariat lembaga mereka semata. Kendatipun demikian, masih ada beragam alasan lain yang menyebabkan mahasiswa kos di kampus.

Kondisi kos yang sepi dan membosankan bisa jadi motif yang mengilhami JF, untuk kos di kampus. Sudah sekira satu tahunan JF kos di sekretariat Mapala Satubumi (Fak. Teknik). Lain halnya dengan WL, lokasi kosnya yang jauh dari kampus akhirnya membuat mahasiswa Jurusan Perikanan ini hengkang dari kosnya. Apalagi jika dihadapkan pada jam operasi bus umum di Jogjakarta yang hanya sampai pukul 18.00 wib. Mahasiswa yang memiliki kendaraan pribadi sekali pun, juga merasakan betapa sulitnya jika kos jauh dari kampus, belum lagi ditambah kejenuhan akibat terjebak kemacetan lalu lintas.
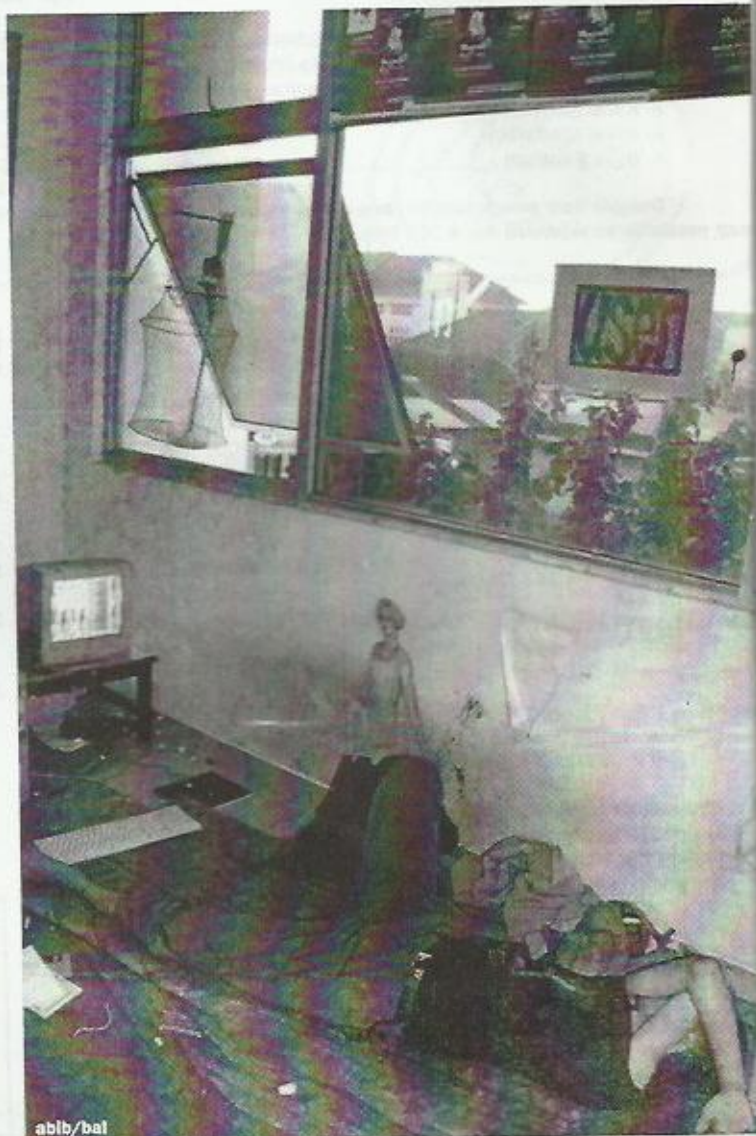
Bagi mahasiswa yang aktif berlembaga, lokasi kos yang dekat dengan kampus diperlukan untuk memperlancar kinerja lembaga. Karena itulah sekretariat yang memiliki posisi strategis menjadi pilihan untuk tempat tinggal. Bahkan guna kepentingan tersebut, ada lembaga yang membuat kebijakan agar pengurusnya tinggal di sekretariat. Hal inilah yang ditempuh oleh Menwa (Resimen Mahasiswa). Sementara MH yang menjadi pengurus Jama'ah Shalahuddin mengatakan bahwa para JS-ers (sebutan untuk pengurus Jama'ah Shalahuddin--*Red.*) hanya

bermukim di sekretariat ketika ada kegiatan yang tinggi intensitasnya, sehingga pekerjaan lebih cepat selesai.

Sekretariat lembaga kemahasiswaan rata-rata memilki aset vital yang harganya relatif mahal dan sulit untuk dipindah-pindahkan. Maka pengurus lembaga yang bersangkutan harus memberikan perhatian ekstra. Hal semacam itu juga bisa jadi alibi mahasiswa untuk jadi penghuni kantor sekretariat.

Setiap fakultas memang memiliki petugas keamanan yang resmi. Namun, jumlahnya dinilai belum sepadan dengan luas wilayah yang harus dijaga. Di fakultas yang areanya cukup luas, keberadaan mahasiswa yang bermukim di kampus sangat membantu para petugas tersebut. Alasan inilah yang dikemukakan oleh WR, salah seorang anggota *Science Music Community* (SMC) Fak. MIPA, untuk menjelaskan mengapa diperlukan mahasiswa yang menetap di kampus.

Yang paling memprihatinkan adalah kasus mahasiswa yang kos di kampus karena memang tidak ada biaya. Kasus tersebut seharusnya mendapat perhatian lebih dari pihak Rektorat. Harus diakui, tidak semua mahasiswa UGM bercukupan dalam hal ekonomi. Adalah JP dan YS, penghuni salah satu sekretariat lembaga kemahasiswaan di Fak. Pertanian, yang mengaku berat untuk bisa membayar sewa kos. Apalagi, mereka juga mendapat keuntungan lain. Dengan menjadi penghuni sekretariat, mereka bisa menggunakan banyak inventaris seperti komputer, maupun buku-buku dengan gratis.

Maraknya mahasiswa yang kos di kampus membuat pihak Rektorat mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pelarangan menjadikan kampus sebagai tempat tinggal. SK ini diteruskan ke Dekanat tiap- tiap Fakultas dan mendapat tanggapan yang beragam. Dekanat dari kampus barat (kampus UGM yang berada di sebelah barat Jalan Kaliurang--*Red.*) cenderung 'mengamini' SK tersebut, sedangkan Dekanat kampus timur (kampus UGM yang berada di sebelah timur Jalan Kaliurang--*Red.*) masih memberikan kompromi terhadap implementasinya.

Karena pihak fakultas tidak memberi izin untuk timggal di kampus, para mahasiswa dari kampus barat mencoba alternatif. Salah satunya dengan membuat jadwal piket menginap di sekretariat lembaga. Ketika ada kegiatan yang membuat mereka harus tinggal sementara di kampus, maka mereka melaporkan kegiatannya kepada pihak dekanat ataupun petugas keamanan. Walaupun demikian, perbedaan tanggapan ini tentu dapat menimbulkan kecemburuan dari pihak mahasiswa kampus barat. Untuk itu perlu pihak dekanat dan mahasiswa perlu mengadakan pembicaraan ulang sehingga diperoleh solusi yang lebih komprehensif untuk mengakomodasi semua pihak. Semoga!

AdAM

tentang Balairung

"BALAIRUNG adalah bukti bahwa sekelompok anak muda yang bermodalkan idealisme menggebu dapat menghasilkan karya besar, secara terus-menerus,..." demikian catat Bambang Hari Murti (BHM), Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, suatu hari di penghujung Juni 2003.

Berdiri tahun 1985, Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) UGM BALAIRUNG merupakan pers mahasiswa generasi ketiga di UGM. Sekaligus, merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Khusus tingkat universitas yang menjadi wadah bagi mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang jurnalistik.

Di usianya yang kesembilan belas, BALAIRUNG telah meneguhkan posisinya dalam menyikapi tuntutan terhadap pers mahasiswa pasca-'98. Dua produk utamanya, Jurnal BALAIRUNG dan BALAIRUNG Koran (BALKON), masing-masing merupakan bukti nyata bagaimana BALAIRUNG berani untuk bermain sekaligus di ranah pers wacana *(press of discourse)* dan media komunitas (*community paper*).

Dan tak hanya itu, sebagai bentuk kecintaan terhadap dunia seni dan sastra, BALAIRUNG juga menerbitkan Kumpulan Cerpen Terpilih BALAIRUNG (KCTB) yang merupakan hasil karya sastra mahasiswa. Pun, semua itu diperkaya dengan berbagai kegiatan non-penerbitan: penelitian, pemateri diklat dan workshop jurnalistik, *event-organizer*, dll.

Semua kerja keras itu mengantarkan BALAIRUNG sebagai satu-satunya pers mahasiswa yang meraih Juara I Penerbitan Alternatif-ISAI tiga kali berturut-turut (1998,1999, dan 2000). Sehingga sampai saat ini, BALAIRUNG masih dipercaya sebagai tolok ukur pers mahasiswa nasional.[]

. some of our hard work

Jurnal Ilmiah Populer Balairung

2001
scripta manent

2003
sketsa kaum muda

2004
yang terhempas
yang bertahan

Balkon khusus

Kumpulan cerpen terbaik Balairung

2000

Rendez -vouz
tentang percakapan
dan mimpi

2001

Melankoli
Selaksa
Bintang
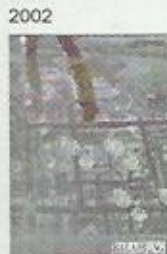
2002

Seekor anjing
dengan luka
di tengkuk

2003

Dian
si talang panjang

Temukan kami di >> Kompleks perumahan dosen UGM
Bulaksumur B 21 Yogyakarta 55281

Si Lyik
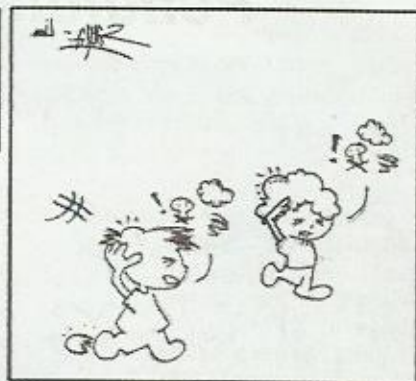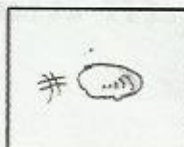
sepi sekali !!!

Pendidikan ala Indonesia

"Jasmerah. Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah". Begitulah pesan Soekarno. Perjalanan panjang bangsa telah mengajarkan kepada kita akan pentingnya pendidikan.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Hasilnya dirasakan nanti. Sepuluh, dua puluh, atau mungkin, lima puluh tahun lagi. Pidato Wilhelmina (1901), Ratu Kerajaan Belanda, sebagai cikal bakal kebijakan politik etisenn *eerschuld*se tidaknya baru dilihat hasilnya empat puluh empat tahun kemudian. Edukasi sebagi salah satu trilogi kebijakan *een eerschuld* disamping irigasi dan emigrasi yang diusulkan Van de Venter telah melahirkan manusia macam Soekarno, Tan Malaka, Hatta, Sjahrir dll.

Indonesia merdeka. Tidak berlebihan. Mungkin kita belum merdeka jika tidak dipimpin oleh tokoh-tokoh terdidik itu. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda tidak mungkin hanya mengandalkan perjuangan fisik. Dan sejarah membuktikan itu.

Nyaris lupa. 17 Agustus kemarin, bangsa ini bertambah usia. 59 tahun sudah bangsa ini merajut kehidupannya sendiri. Tak terkecuali di bidang pendidikan. Paradigma pendidikan warisan kolonial harus segera dibuang jauh-jauh. Tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan bangsa. Begitu kira-kira alasannya. Konon, pendidikan *ala* Indonesia*lah* yang paling tepat. Yakni pendidikan yang sesuai dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa.
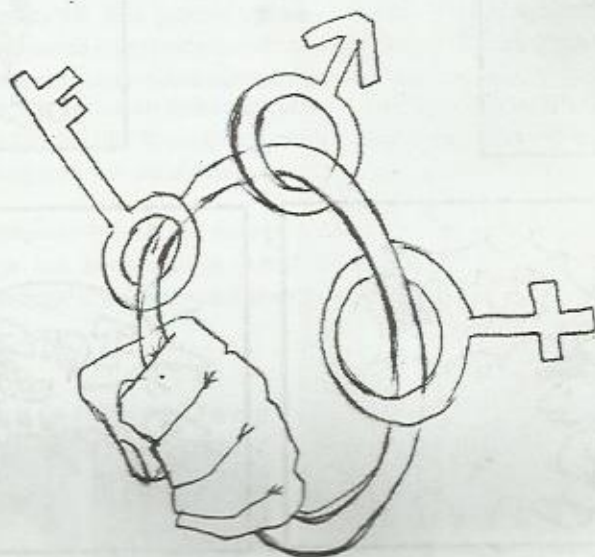
Sambil membusungkan dada, saya pun mengangguk mantap. Lihatlah, berbagai instutusi pendidikan telah berdiri dan menjamur sampai ke pelosok negeri. Termasuk ke *kampuang* saya di pelosok Bukittinggi sana. Dari TK, Sekolah Umum, Madrasah, hingga Perguruan Tinggi. "Angka buta huruf terus berkurang dari tahun ke tahun," begitu data Depdiknas yang saya baca. Meski, majalah *Asianweeks* menyatakan bahwa SDM Indonesia berada di urutan 112 dunia. Di bawah Vietnam, Malaysia, apalagi Singapura. Ya, terus terang, saya sedikit kecewa. Sembari sedikit menghibur diri. *Ah, itu kan versinya Asianweeks* saja.

Yang saya tahu, setiap hari, adik kecil saya pergi sekolah dengan dahi berkerut, dan tas penuh buku. Sampai-sampai, adik kecil saya itu tak lagi punya banyak waktu untuk bermain. Di tempat lain, saya dengar, seorang bocah SD nekat bunuh diri karena tak punya baju seragam. Wahyu Hidayat, praja Sekolah Tinggi Pendidikan Dalam Negeri (STPDN), harus meregang nyawa setelah disiksa oleh kakak kelasnya. Kemudian, mahasiswa PTS ternama Jakarta tega mencabut hak hidup pacarnya sendiri. Dan tetangga saya, anak seorang petani kelas teri, terpaksa mengubur mimpi karena *down* melihat biaya BOP, SPP, dan SPMA, yang harus dibayarnya demi mengecap bangku kuliah.

Berbagai kenyataan itu membingungkan saya. Membuat saya bertanya-tanya. Inikah *ala* Indonesia yang selalu didengungkan itu. Saya ragu untuk mengatakan *iya.* Karena, mengutip *omongan* Socratessaya tidak tahu apa itu *ala* Indonesia. Ya, ternyata, saya memang tidak tahu apa-apa.[]

Penginterupsi

BPPM UGM BALAIRUNG menyediakan
"rumah" untuk segala macam idealisme
agama, kepercayaan, jalan hidup,
dan semua yang berhubungan dengan otakmu

BALAIRUNG bisa ditemukan di
Kompleks Perumahan dosen UGM
Bulaksumur B21
Yogyakarta

image di"colong" dari time.com
(bahkan mencuri pun juga butuh idealisme)